

LAPORAN KEUANGAN
BPSDM PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021
(AUDITED)



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021



**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Per 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Juni 2022

fr. Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta, d

Mochamad Miftahulloh Tamary
NIP. 197812131997111001



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, kita panjatkan kepada Tuhan Seru Sekalian Alam atas limpahan rahmat taufik serta hidayahNya kita dapat menyelesaikan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta untuk per 31 Desember 2021.

Laporan ini berisi laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Penjelasan/Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang menjelaskan dasar hukum dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam penyusunan laporan keuangan ini.

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Instruksi Gubernur Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penyusunan Neraca Pembuka (Neraca Awal), Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Semoga laporan ini bermanfaat dan memberikan gambaran kondisi aset dan ekuitas BPSDM Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Juni 2022

Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta, d


Mochamad Miftahulloh Tamary
NIP 197812131997111001



DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggung Jawab.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	iv
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	v
Laporan Operasional	vi
Laporan Perubahan Ekuitas	vii
Neraca	viii
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).....	1
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	5
Bab II Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja	7
2.1 Ekonomi Makro	7
2.2 Kebijakan Keuangan.....	8
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	9
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	10
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	10
3.2 Hambatan dan Kendala	12
Bab IV Kebijakan Akuntansi	13
4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan.....	16
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	17
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .	17
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP	32



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Bab V	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan	34
5.1	Laporan Realisasi Anggaran	34
5.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	44
5.3	Laporan Operasional	45
5.4	Laporan Perubahan Ekuitas	48
5.5	Neraca	51
5.6	Laporan Arus Kas	60
Bab VI	Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.....	62
6.1	Gambaran Umum	62
6.2	Kedudukan dan Tugas Pokok.....	63
6.3	Struktur Organisasi.....	65
6.4	Sistem Pengendalian Intern	67
Bab VII	Penutup.....	68



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Per 31 DESEMBER 2021**

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	%	REALISASI 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
1	2	3	4	5	6 = 5/4	8
	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	Pendapatan Asli Daerah					
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah		450,440,000.00	781,334,249.00	173.46	154,376,353.00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		450,440,000.00	781,334,249.00	173.46	154,376,353.00
	Dana Perimbangan					
4.2.01.01	Dana Perimbangan		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum		0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Dana Perimbangan		0.00	0.00	0.00	0.00
	Lain-lain Pendapatan yang Sah					
4.3.01	Pendapatan Hibah		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.02	Dana Darurat		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.02.01	Dana Penyesuaian		0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN		450,440,000.00	781,334,249.00	173.46	154,376,353.00
	BELANJA DAERAH					
	Belanja Operasi					
5.1.01	Belanja Pegawai		51,652,511,866.00	50,778,250,497.00	98.31	30,717,799,637.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		25,326,512,990.00	24,634,034,200.00	97.27	20,405,381,725.00
5.1.03	Belanja Bunga		0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.04	Belanja Subsidi		0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05	Belanja Hibah		0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial		0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Belanja Operasi		76,979,024,856.00	75,412,284,697.00	97.96	51,123,181,362.00
	Belanja Modal					
5.2.01	Belanja Tanah		0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin		791,939,643.00	740,426,000.00	93.50	336,310,975.00
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan		0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Belanja Modal		791,939,643.00	740,426,000.00	93.50	336,310,975.00
	Belanja Tak Terduga					
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Belanja Tak Terduga		0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA DAERAH		77,770,964,499.00	76,152,710,697.00	97.92	51,459,492,337.00
	SURPLUS / (DEFISIT)		(77,320,524,499.00)	(75,371,376,448.00)	97.48	(51,305,115,984.00)
	6.1 Penerimaan Pembiayaan					
6.1.01	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya		0.00	154,376,353.00	0.00	0.00
6.1.01.08.01	SILPA Dana BLUD Tahun Anggaran Sebelumnya		0.00	154,376,353.00	0.00	0.00
6.1.01.08.01.0002	Transfer SILPA antar BLUD		0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.01.08.01.0003	Koreksi SILPA BLUD		0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.01.01	SILPA Dana APBD Tahun Anggaran Sebelumnya		0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan		0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.03	Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		0.00	0.00	0.00	0.00

NO.	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	%	REALISASI 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
1	2	3	4	5	6 = 5/4	8
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		0.00	154,376,353.00	0.00	0.00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan					
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan		0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.05	dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan		0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN		0.00	154,376,353.00	0.00	0.00
	SiLPA / (SiKPA)		(77,320,524,499.00)	(75,217,000,095.00)	97.28	(51,305,115,984.00)
	SiLPA / (SiKPA) Dana BLUD			264,269,777.00		154,376,353.00
	SiLPA / (SiKPA) Dana Subsidi			(75,481,269,872.00)		(51,459,492,337.00)

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
PROVINSI DKI JAKARTA,


MOCHAMAD MIFTAHULLOH TAMARY
NIP. 19781213199711101

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	%	REALISASI 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
1	2	3	4	5	6 = 5/4	8
	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	Pendapatan Asli Daerah					
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah		450,440,000.00	781,334,249.00	173.46	154,376,353.00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		450,440,000.00	781,334,249.00	173.46	154,376,353.00
	Dana Perimbangan					
4.2.01.01	Dana Perimbangan		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum		0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Dana Perimbangan		0.00	0.00	0.00	0.00
	Lain-lain Pendapatan yang Sah					
4.3.01	Pendapatan Hibah		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.02	Dana Darurat		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.01.02.01	Dana Penyesuaian		0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN		450,440,000.00	781,334,249.00	173.46	154,376,353.00
	BELANJA DAERAH					
	Belanja Operasi					
5.1.01	Belanja Pegawai		51,652,511,866.00	50,778,250,497.00	98.31	30,717,799,637.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		25,326,512,990.00	24,634,034,200.00	97.27	20,405,381,725.00
5.1.03	Belanja Bunga		0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.04	Belanja Subsidi		0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05	Belanja Hibah		0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial		0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Belanja Operasi		76,979,024,856.00	75,412,284,697.00	97.96	51,123,181,362.00
	Belanja Modal					
5.2.01	Belanja Tanah		0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin		791,939,643.00	740,426,000.00	93.50	336,310,975.00
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan		0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Belanja Modal		791,939,643.00	740,426,000.00	93.50	336,310,975.00
	Belanja Tak Terduga					
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Belanja Tak Terduga		0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA DAERAH		77,770,964,499.00	76,152,710,697.00	97.92	51,459,492,337.00
	SURPLUS / (DEFISIT)		(77,320,524,499.00)	(75,371,376,448.00)	97.48	(51,305,115,984.00)
	Penerimaan Pembiayaan					
6.1	Penerimaan Pembiayaan					
6.1.01	SilPA Tahun Anggaran Sebelumnya		0.00	154,376,353.00	0.00	0.00
6.1.01.08.01	SilPA Dana BLUD Tahun Anggaran Sebelumnya		0.00	154,376,353.00	0.00	0.00
6.1.01.08.01.0002	Transfer SilPA antar BLUD		0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.01.08.01.0003	Koreksi SilPA BLUD		0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.01.01	SilPA Dana APBD Tahun Anggaran Sebelumnya		0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan		0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.03	Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		0.00	0.00	0.00	0.00

NO.	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	%	REALISASI 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
1	2	3	4	5	6 = 5/4	8
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		0.00	154,376,353.00	0.00	0.00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan					
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan		0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.05	dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan		0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN		0.00	154,376,353.00	0.00	0.00
	SiLPA / (SiKPA)		(77,320,524,499.00)	(75,217,000,095.00)	97.28	(51,305,115,984.00)
	SiLPA / (SiKPA) Dana BLUD			264,269,777.00		154,376,353.00
	SiLPA / (SiKPA) Dana Subsidi			(75,481,269,872.00)		(51,459,492,337.00)

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIETAHULLOH TAMARY
NIP. 19781213199711101



**LAPORAN PERUBAHAN
SALDO ANGGARAN LEBIH
TAHUN ANGGARAN 2021
Per 31 DESEMBER 2021**

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
Saldo Anggaran Lebih Awal - Dana BLUD		154,376,353.00	-
Penggunaan SAL Dana BLUD sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		(154,376,353.00)	-
Subtotal		-	-
Pendapatan		781,334,249.00	154,376,353.00
Belanja		(76,152,710,697.00)	(51,459,492,337.00)
Surplus / (Defisit)		(75,371,376,448.00)	(51,305,115,984.00)
Penerimaan Pembiayaan		154,376,353.00	-
Pengeluaran Pembiayaan		-	-
Pembiayaan Netto		154,376,353.00	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		(75,217,000,095.00)	(51,305,115,984.00)
Subtotal		(75,217,000,095.00)	(51,305,115,984.00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir		(75,217,000,095.00)	(51,305,115,984.00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir - Dana BLUD		264,269,777.00	154,376,353.00
Saldo Anggaran Lebih Akhir - Dana Subsidi		(75,481,269,872.00)	(51,459,492,337.00)

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
 DAYA MANUSIA (GABUNGAN)
 PROVINSI DKI JAKARTA,


 MOCHAMAD MIFTAHULLOH TAMARY
 NIP. 19781213199711101

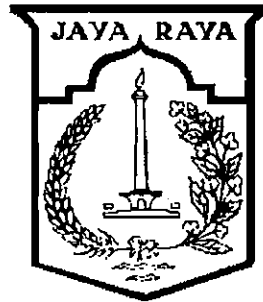
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
Saldo Anggaran Lebih Awal - Dana BLUD		154,376,353.00	-
Penggunaan SAL Dana BLUD sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		(154,376,353.00)	-
Subtotal		-	-
Pendapatan		781,334,249.00	154,376,353.00
Belanja		(76,152,710,697.00)	(51,459,492,337.00)
Surplus / (Defisit)		(75,371,376,448.00)	(51,305,115,984.00)
Penerimaan Pembiayaan		154,376,353.00	-
Pengeluaran Pembiayaan		-	-
Pembiayaan Netto		154,376,353.00	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		(75,217,000,095.00)	(51,305,115,984.00)
Subtotal		(75,217,000,095.00)	(51,305,115,984.00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir		(75,217,000,095.00)	(51,305,115,984.00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir - Dana BLUD		264,269,777.00	154,376,353.00
Saldo Anggaran Lebih Akhir - Dana Subsidi		(75,481,269,872.00)	(51,459,492,337.00)

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA (GABUNGAN)
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH TAMARY
NIP 19781213199711101



**LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2021
Per 31 DESEMBER 2021**

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	31 DESEMBER 2020 (AUDITED)	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	784,334,249.00	154,376,353.00	629,957,896.00	408.07
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	784,334,249.00	154,376,353.00	629,957,896.00	408.07
PENDAPATAN TRANSFER				
DANA PERIMBANGAN - LO				
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Alokasi Umum - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Alokasi Khusus - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Dana Perimbangan - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Darurat - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya -	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN	784,334,249.00	154,376,353.00	629,957,896.00	408.07
BEBAN				
Beban Pegawai	45,800,503,374.00	35,804,904,345.00	9,995,599,029.00	27.92
Beban Barang	1,681,243,814.00	14,578,815,305.00	(12,897,571,491.00)	(88.47)
Beban Jasa	22,875,769,631.00	4,603,686,024.00	18,272,083,607.00	396.90
Beban Pemeliharaan	223,237,886.00	40,802,781.00	182,435,105.00	447.11
Beban Perjalanan Dinas	12,220,000.00	2,310,000.00	9,910,000.00	429.00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Penyisihan Piutang	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,118,652,356.00	1,336,937,591.00	(218,285,235.00)	(16.33)
JUMLAH BEBAN	71,711,627,061.00	56,367,456,046.00	15,344,171,015.00	27.22
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(70,927,292,812.00)	(56,213,079,693.00)	(14,714,213,119.00)	26.18
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0.00	0.00	0.00	0.00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEG. NON	0.00	0.00	0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(70,927,292,812.00)	(56,213,079,693.00)	(14,714,213,119.00)	26.18
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Luar Biasa/Beban Tidak Terduga	0.00	0.00	0.00	0.00
POS LUAR BIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(70,927,292,812.00)	(56,213,079,693.00)	(14,714,213,119.00)	26.18

g. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA (GABUNGAN)
PROVINSI DKI JAKARTA,


MOCHAMAD MIFTAHULLOH TAMARY
NIP. 19781213199711101

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	31 DESEMBER 2020 (AUDITED)	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	784,334,249.00	154,376,353.00	629,957,896.00	408.07
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	784,334,249.00	154,376,353.00	629,957,896.00	408.07
PENDAPATAN TRANSFER				
DANA PERIMBANGAN - LO				
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Alokasi Umum - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Alokasi Khusus - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Dana Perimbangan - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Darurat - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya -	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN	784,334,249.00	154,376,353.00	629,957,896.00	408.07
BEBAN				
Beban Pegawai	45,800,503,374.00	35,804,904,345.00	9,995,599,029.00	27.92
Beban Barang	1,681,243,814.00	14,578,815,305.00	(12,897,571,491.00)	(88.47)
Beban Jasa	22,875,769,631.00	4,603,686,024.00	18,272,083,607.00	396.90
Beban Pemeliharaan	223,237,886.00	40,802,781.00	182,435,105.00	447.11
Beban Perjalanan Dinas	12,220,000.00	2,310,000.00	9,910,000.00	429.00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Penyisihan Piutang	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,118,652,356.00	1,336,937,591.00	(218,285,235.00)	(16.33)
JUMLAH BEBAN	71,711,627,061.00	56,367,456,046.00	15,344,171,015.00	27.22
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(70,927,292,812.00)	(56,213,079,693.00)	(14,714,213,119.00)	26.18
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0.00	0.00	0.00	0.00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEG. NON	0.00	0.00	0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(70,927,292,812.00)	(56,213,079,693.00)	(14,714,213,119.00)	26.18
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Beban Luar Biasa/Beban Tidak Terduga	0.00	0.00	0.00	0.00
POS LUAR BIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(70,927,292,812.00)	(56,213,079,693.00)	(14,714,213,119.00)	26.18

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA (GABUNGAN)
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIETAHULLOH TAMARY
NIP. 19781213199711101



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN ANGGARAN 2021
Per 31 DESEMBER 2021

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2020 dan 2019		397,930,443,623.00	323,615,134,309.00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		49,744,964,179.00	130,544,175,128.00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0.00	0.00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2021 dan 2020		447,675,407,802.00	454,159,309,437.00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2020 dan 2019		49,744,964,179.00	130,544,175,128.00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(49,744,964,179.00)	(130,544,175,128.00)
RK PPKD per 1 Januari 2021 dan 2020		0.00	0.00
JUMLAH EKUITAS AWAL		447,675,407,802.00	454,159,309,437.00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(70,927,292,812.00)	(56,213,079,693.00)
Mutasi RK PPKD		75,231,568,956.00	49,744,964,179.00
Koreksi Ekuitas		(2,661,567,072.00)	(15,786,121.00)
Jumlah Perubahan Ekuitas		1,642,709,072.00	(6,483,901,635.00)
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		374,086,547,918.00	397,930,443,623.00
RK PPKD		75,231,568,956.00	49,744,964,179.00
EKUITAS AKHIR		449,318,116,874.00	447,675,407,802.00

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA (GABUNGAN)
 PROVINSI DKI JAKARTA,

MOCHAMAD MIFTAHULLOH TAMARY
 NIP 19781213199711101

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2020 dan 2019		397,930,443,623.00	323,615,134,309.00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		49,744,964,179.00	130,544,175,128.00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0.00	0.00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2021 dan 2020		447,675,407,802.00	454,159,309,437.00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2020 dan 2019		49,744,964,179.00	130,544,175,128.00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(49,744,964,179.00)	(130,544,175,128.00)
RK PPKD per 1 Januari 2021 dan 2020		0.00	0.00
JUMLAH EKUITAS AWAL		447,675,407,802.00	454,159,309,437.00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(70,927,292,812.00)	(56,213,079,693.00)
Mutasi RK PPKD		75,231,568,956.00	49,744,964,179.00
Koreksi Ekuitas		(2,661,567,072.00)	(15,786,121.00)
Jumlah Perubahan Ekuitas		1,642,709,072.00	(6,483,901,635.00)
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		374,086,547,918.00	397,930,443,623.00
RK PPKD		75,231,568,956.00	49,744,964,179.00
EKUITAS AKHIR		449,318,116,874.00	447,675,407,802.00

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA (GABUNGAN)
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH TAMARY
NIP 19781213199711101



NERACA
TAHUN ANGGARAN 2021
Per 31 DESEMBER 2021

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Potongan Non Pajak yang Belum Disetor		0.00	0.00
Uang Muka Jasa BLUD		0.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah		0.00	0.00
Kas Dana BOS		0.00	0.00
Kas Tunai BOS		0.00	0.00
Kas Bank BOS		0.00	0.00
Jasa Giro Dana BOS yang Belum Disetor		0.00	0.00
Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor		0.00	0.00
PPh 21 Dana BOS yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 22 Dana BOS yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 23 Dana BOS yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 26 Dana BOS yang belum disetor		0.00	0.00
PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BOS yang belum disetor		0.00	0.00
PPN Dana BOS yang belum disetor		0.00	0.00
PPn-BM Dana BOS yang belum disetor		0.00	0.00
PKF BOS Lainnya yang belum disetor		0.00	0.00
Kas Dana BOP		0.00	0.00
Kas Tunai BOP		0.00	0.00
Kas Bank BOP		0.00	0.00
Jasa Giro Dana BOP yang Belum Disetor		0.00	0.00
Potongan PFK Dana BOP yang Belum Disetor		0.00	0.00
PPh 21 Dana BOP yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 22 Dana BOP yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 23 Dana BOP yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 26 Dana BOP yang belum disetor		0.00	0.00
PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BOP yang belum disetor		0.00	0.00
PPN Dana BOP yang belum disetor		0.00	0.00
PPn-BM Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor		0.00	0.00
PKF BOP Kesetaraan Lainnya yang belum disetor		0.00	0.00
Kas Dana BOP Kesetaraan		0.00	0.00
Kas Tunai BOP Kesetaraan		0.00	0.00
Kas Bank BOP Kesetaraan		0.00	0.00
Jasa Giro Dana BOP Kesetaraan yang Belum Disetor		0.00	0.00
Potongan PFK Dana BOP Kesetaraan yang Belum Disetor		0.00	0.00
PPh 21 Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 22 Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 23 Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 26 Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor		0.00	0.00
PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor		0.00	0.00
PPN Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor		0.00	0.00
PPn-BM Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor		0.00	0.00
PKF BOP Kesetaraan Lainnya yang belum disetor		0.00	0.00
Kas di Bendahara Sekolah Lainnya		0.00	0.00
Investasi Jangka Pendek		0.00	0.00
Investasi dalam Saham		0.00	0.00
Investasi dalam Obligasi		0.00	0.00
Investasi Jangka Pendek Lainnya		0.00	0.00
Piutang Pendapatan		3,000,000.00	0.00
Piutang Pajak Daerah		0.00	0.00
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor		0.00	0.00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		0.00	0.00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		0.00	0.00
Piutang Pajak Air Permukaan		0.00	0.00
Piutang Pajak Rokok		0.00	0.00
Piutang Pajak Hotel		0.00	0.00
Piutang Pajak Restoran		0.00	0.00
Piutang Pajak Hiburan		0.00	0.00
Piutang Pajak Reklame		0.00	0.00
Piutang Pajak Penerangan Jalan		0.00	0.00
Piutang Pajak Parkir		0.00	0.00
Piutang Pajak Air Tanah		0.00	0.00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		0.00	0.00
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		0.00	0.00
Piutang Retribusi		0.00	0.00
Piutang Retribusi Jasa Umum		0.00	0.00

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Piutang Retribusi Jasa Usaha		0.00	0.00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		0.00	0.00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		3,000,000.00	0.00
Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		0.00	0.00
Piutang Hasil Sewa BMD		0.00	0.00
Piutang Hasil lelang titik reklame		0.00	0.00
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah		0.00	0.00
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		0.00	0.00
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		0.00	0.00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah		0.00	0.00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah		0.00	0.00
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		0.00	0.00
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		0.00	0.00
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		0.00	0.00
Piutang BLUD		3,000,000.00	0.00
Piutang Jasa Layanan Umum BLUD		3,000,000.00	0.00
Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa		3,000,000.00	0.00
Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0.00	0.00
Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0.00	0.00
Piutang Hibah BLUD		0.00	0.00
Piutang Hasil Kerjasama BLUD		0.00	0.00
Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah		0.00	0.00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya		0.00	0.00
Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga		0.00	0.00
Piutang Rekomendasi HGB HPL		0.00	0.00
Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah		0.00	0.00
Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks. BPPN		0.00	0.00
Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun		0.00	0.00
Piutang PDAM Rumah Susun		0.00	0.00
Piutang Listrik Rumah Susun		0.00	0.00
Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)		0.00	0.00
Piutang Pelanggaran atas Izin Mendirikan Bangunan		0.00	0.00
Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0.00	0.00
Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi		0.00	0.00
Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ketiga		0.00	0.00
Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame		0.00	0.00
Piutang Lainnya		0.00	0.00
Uang Muka		0.00	0.00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0.00	0.00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0.00	0.00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0.00	0.00
Piutang Tunjangan DPRD		0.00	0.00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0.00	0.00
Piutang Hubungan Istimewa Kewajiban Setor Surplus Dana BLUD		0.00	0.00
Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi		0.00	0.00
Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga		0.00	0.00
Piutang Hibah		0.00	0.00
Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak Rokok		0.00	0.00

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Penyisihan Piutang Pajak Hotel		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak Restoran		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak Reklame		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak Parkir		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Retribusi		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum		0.00	0.00
Penyisihan Piutang retribusi Jasa Usaha		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Daerah Tak Tertagih		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Denda Retribusi		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		0.00	0.00
Penyisihan Piutang BLUD		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Hibah BLUD		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama BLUD		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Rekomendasi HGB HPL		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Rekomendasi HGB diatas HPL/EKS oleh PT Pembangunan Jaya Ancol sederhana/murah		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pelanggaran atas Izin Mendirikan Bangunan		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ketiga		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Lainnya		0.00	0.00
Penyisihan Uang Muka Kerja		0.00	0.00
Penyisihan Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0.00	0.00
Penyisihan Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD		0.00	0.00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Hibah		0.00	0.00

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan pengembalian UMK pengadaan Trans Jakarta		0.00	0.00
Belanja Dibayar Dimuka		1,621,267.00	38,550,358.00
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka		0.00	0.00
Belanja Barang Dibayar Dimuka		1,621,267.00	38,550,358.00
Belanja Jasa Dibayar Dimuka		0.00	0.00
Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka		0.00	0.00
Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		0.00	0.00
Persediaan		1,062,425,551.00	1,252,411,420.00
Barang Pakai Habis		1,062,425,551.00	1,252,411,420.00
Barang Tak Habis Pakai		0.00	0.00
Barang Bekas Dipakai		0.00	0.00
Jumlah Aset Lancar		1,331,316,595.00	1,445,338,131.00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0.00	0.00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0.00	0.00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		0.00	0.00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta		0.00	0.00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0.00	0.00
Investasi dalam Obligasi		0.00	0.00
Dana Bergulir		0.00	0.00
Dana Bergulir		0.00	0.00
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih		0.00	0.00
Deposito Jangka Panjang		0.00	0.00
Investasi Non Permanen Lainnya		0.00	0.00
Investasi Permanen		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PD Air Minum Jaya		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PD Dharma Jaya		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PD Pembangunan Sarana Jaya		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PD Pasar Jaya		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PD PAL Jaya		0.00	0.00
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Jaya		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Food Station Tjipinang		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Delta Djakarta Tbk		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Jaya Ancol		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Ratax Armada		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Kawasan Berikat Nusantara		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Cemani Toka		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Pakuan International		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Grahasahari Suryajaya		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Asuransi Bangun Askrida		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Propertindo		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Bank DKI Jakarta		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta International Expo		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Tourisindo		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Rumah Sakit Haji		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Transportasi Jakarta		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Penjamin Kredit Daerah		0.00	0.00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		0.00	0.00
ASET TETAP			
Tanah		447,890,625,000.00	447,890,625,000.00
Peralatan dan Mesin		12,043,234,703.00	11,755,475,924.00
Gedung dan Bangunan		0.00	0.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0.00	0.00
Aset Tetap Lainnya		321,807,220.00	321,807,220.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(9,805,140,334.00)	(8,872,151,099.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(9,805,140,334.00)	(8,872,151,099.00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan		0.00	0.00

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00
Jumlah Aset Tetap		450,450,526,589.00	451,095,757,045.00
DANA CADANGAN		0.00	0.00
ASET LAINNYA			
Tagihan Penjualan Angsuran		0.00	0.00
Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah		0.00	0.00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0.00	0.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0.00	0.00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		0.00	0.00
Kerja Sama Pemanfaatan		0.00	0.00
Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)		0.00	0.00
Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)		0.00	0.00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0.00	0.00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan		0.00	0.00
Aset Tidak Berwujud		0.00	0.00
Goodwill		0.00	0.00
Lisensi dan franchise		0.00	0.00
Hak Cipta		0.00	0.00
Hak Paten		0.00	0.00
Software		0.00	0.00
Aset Tidak Berwujud Lainnya		0.00	0.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0.00	0.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Goodwill		0.00	0.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise		0.00	0.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta		0.00	0.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten		0.00	0.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software		0.00	0.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya		0.00	0.00
Aset Lain-lain		511,517,103.00	1,690,707,150.00
Aset Rusak Berat/Usang		511,517,103.00	1,690,707,150.00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0.00	0.00
Aset Tetap - Belum Validasi		0.00	0.00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0.00	0.00
Aset Tetap - Fasos Fasum		0.00	0.00
Aset Lain-lain di BLUD		0.00	0.00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0.00	0.00
Aset di BP THR Lokasari		0.00	0.00
Aset Lembaga di Biro Dikmental		0.00	0.00
Kas Dikonsinyasikan		0.00	0.00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya		0.00	0.00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0.00	0.00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0.00	0.00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		0.00	0.00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0.00	0.00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(247,039,756.00)	(1,400,811,987.00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		(247,039,756.00)	(1,400,811,987.00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		0.00	0.00

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0.00	0.00
Jumlah Aset Lainnya		264,477,347.00	289,895,163.00
R/K SKPD		0.00	0.00
RK SKPD Kas		0.00	0.00
RK SKPD Non Kas		0.00	0.00
JUMLAH ASET		452,046,320,531.00	452,830,990,339.00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0.00	0.00
Utang Taspen		0.00	0.00
Utang Taspen		0.00	0.00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0.00	0.00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS		0.00	0.00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS di PPKD		0.00	0.00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS di SPKD/BLUD		0.00	0.00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS		0.00	0.00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS di PPKD		0.00	0.00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS di SPKD/BLUD		0.00	0.00
Utang PPh Pusat		0.00	0.00
Utang PPh 21		0.00	0.00
Utang PPh 21 di SPKD dan PPKD		0.00	0.00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0.00	0.00
Utang PPh 22		0.00	0.00
Utang PPh 22 di SPKD dan PPKD		0.00	0.00
Utang PPh 22 Dana BLUD		0.00	0.00
Utang PPh 23		0.00	0.00
Utang PPh 23 di SPKD dan PPKD		0.00	0.00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0.00	0.00
Utang PPh 26		0.00	0.00
Utang PPh 26 di SPKD dan PPKD		0.00	0.00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0.00	0.00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0.00	0.00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SPKD dan PPKD		0.00	0.00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0.00	0.00
Utang PPN Pusat		0.00	0.00
Utang PPN di SPKD dan PPKD		0.00	0.00
Utang PPN Dana BLUD		0.00	0.00
Utang Taperum		0.00	0.00
Utang Taperum		0.00	0.00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0.00	0.00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0.00	0.00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0.00	0.00
Utang Asuransi		0.00	0.00
Utang BPJS Kesehatan		0.00	0.00
Utang BPJS Ketenagakerjaan		0.00	0.00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lain-lain		0.00	0.00
Utang PFK Lainnya		0.00	0.00
Utang Jaminan		0.00	0.00
Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame		0.00	0.00
Utang Jaminan Penawaran		0.00	0.00
Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan		0.00	0.00
Utang Jaminan KTP Musiman		0.00	0.00
Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas		0.00	0.00
Utang Jaminan Sanggah Banding		0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka		0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0.00	0.00

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame		0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna		0.00	0.00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0.00	0.00
Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD		0.00	0.00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah		0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0.00	0.00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0.00	0.00
Utang Belanja		2,728,203,657.00	5,155,582,537.00
Utang Belanja SKPD		2,728,203,657.00	5,101,972,537.00
Utang Belanja Pegawai		2,728,203,657.00	5,087,104,708.00
Utang Belanja Barang dan Jasa SKPD		0.00	14,867,829.00
Utang Belanja Barang		0.00	0.00
Utang Belanja Jasa		0.00	14,867,829.00
Utang Belanja Jasa Non TALI		0.00	0.00
Utang Belanja TALI		0.00	14,867,829.00
Utang Belanja Pemeliharaan		0.00	0.00
Utang Belanja Perjalanan Dinas		0.00	0.00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		0.00	0.00
Utang Belanja Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0.00	0.00
Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta		0.00	0.00
Utang Belanja Subsidi		0.00	0.00
Utang Belanja Hibah		0.00	0.00
Utang Belanja Modal SKPD		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Tanah		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00
Utang Belanja BLUD		0.00	53,610,000.00
Utang Belanja Pegawai BLUD		0.00	0.00
Utang Belanja Barang Jasa BLUD		0.00	53,610,000.00
Utang Belanja Modal BLUD		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Tanah BLUD		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD		0.00	0.00
Utang Hub. Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0.00	0.00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0.00	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0.00	0.00
Utang Kompensasi Pajak		0.00	0.00
Utang Restitusi Pajak		0.00	0.00
Utang Hub. Istimewa Kewajiban Setor Surplus Dana BLUD		0.00	0.00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0.00	0.00
Utang Jaminan		0.00	0.00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0.00	0.00
Utang Jaminan BLUD		0.00	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2,728,203,657.00	5,155,582,537.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0.00	0.00
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		0.00	0.00


BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)		0.00	0.00
JICA SLA.... (Proyek MRT)		0.00	0.00
Utang PEN		0.00	0.00
Utang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00
Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		0.00	0.00
Utang Dalam Negeri Sektor Non Perbankan		0.00	0.00
Utang Dalam Negeri - Obligasi Daerah		0.00	0.00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri		0.00	0.00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Menengah		0.00	0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0.00	0.00
Utang Jangka Panjang di BLUD		0.00	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN		2,728,203,657.00	5,155,582,537.00
EKUITAS - LO		374,086,547,918.00	447,675,407,802.00
RK PPKD		75,231,568,956.00	0.00
RK PPKD Kas		75,481,269,872.00	0.00
RK PPKD Non Kas		(249,700,916.00)	0.00
JUMLAH EKUITAS		449,318,116,874.00	447,675,407,802.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		452,046,320,531.00	452,830,990,339.00


**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA (GABUNGAN)**
 PROVINSI DKI JAKARTA,


MOCHAMAD MIJTAHULLOH TAMARY
 NIP 19781213199711101

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas		264,269,777.00	154,376,353.00
Kas di Kas Daerah		0.00	0.00
Kas Daerah		0.00	0.00
Potongan PFK		0.00	0.00
PPh 21 di PPKD yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 22 di PPKD yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 23 di PPKD yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 26 di PPKD yang belum disetor		0.00	0.00
PPh Pasal 4 ayat (2) di PPKD yang belum disetor		0.00	0.00
PPN di PPKD yang belum disetor		0.00	0.00
Taperum yang belum disetor		0.00	0.00
Iuran Wajib Pegawai yang belum disetor		0.00	0.00
BPJS Kesehatan di PPKD yang belum disetor		0.00	0.00
BPJS Ketenagakerjaan di PPKD yang belum disetor		0.00	0.00
PFK lainnya di PPKD yang belum disetor		0.00	0.00
Kas Transitoris		0.00	0.00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0.00	0.00
Kas dari Jaminan Bank Garansi		0.00	0.00
Kas di Bendahara Penerimaan		0.00	0.00
Pendapatan yang Belum Disetor		0.00	0.00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya		0.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0.00	0.00
Sisa Uang Persediaan		0.00	0.00
Sisa Belanja UP/GU		0.00	0.00
Kas Tunai		0.00	0.00
Kas di Bank		0.00	0.00
Uang Panjar		0.00	0.00
Sisa Belanja LS		0.00	0.00
Sisa Belanja TU		0.00	0.00
Kas Tunai		0.00	0.00
Kas di Bank		0.00	0.00
Uang Panjar		0.00	0.00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor		0.00	0.00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		0.00	0.00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor		0.00	0.00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor		0.00	0.00
PPN di SKPD yang belum disetor		0.00	0.00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor		0.00	0.00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor		0.00	0.00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor		0.00	0.00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor		0.00	0.00
Pendapatan Pajak Daerah Belum Disetor		0.00	0.00
Kas dan Setara Kas BLUD		264,269,777.00	154,376,353.00
Kas BLUD		264,269,777.00	154,376,353.00
Kas Tunai		0.00	0.00
Kas di Bank		264,269,777.00	154,376,353.00
Kas Transitoris BLUD		0.00	0.00
Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor		0.00	0.00
PPh 21 di BLUD yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 22 di BLUD yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 23 di BLUD yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 26 di BLUD yang belum disetor		0.00	0.00
PPh Pasal 4 ayat (2) di BLUD yang belum disetor		0.00	0.00
PPN di BLUD yang belum disetor		0.00	0.00
PPn-BM di BLUD yang belum disetor		0.00	0.00
BPJS Kesehatan di BLUD yang belum disetor		0.00	0.00
BPJS Ketenagakerjaan di BLUD yang belum disetor		0.00	0.00
PFK lainnya di BLUD yang belum disetor		0.00	0.00
Uang Muka Pasien RSUD/K		0.00	0.00
Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya		0.00	0.00
Uang Titipan		0.00	0.00

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Potongan Non Pajak yang Belum Disetor		0.00	0.00
Uang Muka Jasa BLUD		0.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah		0.00	0.00
Kas Dana BOS		0.00	0.00
Kas Tunai BOS		0.00	0.00
Kas Bank BOS		0.00	0.00
Jasa Giro Dana BOS yang Belum Disetor		0.00	0.00
Potongan PFK Dana BOS yang Belum Disetor		0.00	0.00
PPh 21 Dana BOS yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 22 Dana BOS yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 23 Dana BOS yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 26 Dana BOS yang belum disetor		0.00	0.00
PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BOS yang belum disetor		0.00	0.00
PPN Dana BOS yang belum disetor		0.00	0.00
PPn-BM Dana BOS yang belum disetor		0.00	0.00
PKF BOS Lainnya yang belum disetor		0.00	0.00
Kas Dana BOP		0.00	0.00
Kas Tunai BOP		0.00	0.00
Kas Bank BOP		0.00	0.00
Jasa Giro Dana BOP yang Belum Disetor		0.00	0.00
Potongan PFK Dana BOP yang Belum Disetor		0.00	0.00
PPh 21 Dana BOP yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 22 Dana BOP yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 23 Dana BOP yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 26 Dana BOP yang belum disetor		0.00	0.00
PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BOP yang belum disetor		0.00	0.00
PPN Dana BOP yang belum disetor		0.00	0.00
PPn-BM Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor		0.00	0.00
PKF BOP Kesetaraan Lainnya yang belum disetor		0.00	0.00
Kas Dana BOP Kesetaraan		0.00	0.00
Kas Tunai BOP Kesetaraan		0.00	0.00
Kas Bank BOP Kesetaraan		0.00	0.00
Jasa Giro Dana BOP Kesetaraan yang Belum Disetor		0.00	0.00
Potongan PFK Dana BOP Kesetaraan yang Belum Disetor		0.00	0.00
PPh 21 Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 22 Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 23 Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor		0.00	0.00
PPh 26 Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor		0.00	0.00
PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor		0.00	0.00
PPN Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor		0.00	0.00
PPn-BM Dana BOP Kesetaraan yang belum disetor		0.00	0.00
PKF BOP Kesetaraan Lainnya yang belum disetor		0.00	0.00
Kas di Bendahara Sekolah Lainnya		0.00	0.00
Investasi Jangka Pendek		0.00	0.00
Investasi dalam Saham		0.00	0.00
Investasi dalam Obligasi		0.00	0.00
Investasi Jangka Pendek Lainnya		0.00	0.00
Piutang Pendapatan		3,000,000.00	0.00
Piutang Pajak Daerah		0.00	0.00
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor		0.00	0.00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		0.00	0.00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		0.00	0.00
Piutang Pajak Air Permukaan		0.00	0.00
Piutang Pajak Rokok		0.00	0.00
Piutang Pajak Hotel		0.00	0.00
Piutang Pajak Restoran		0.00	0.00
Piutang Pajak Hiburan		0.00	0.00
Piutang Pajak Reklame		0.00	0.00
Piutang Pajak Penerangan Jalan		0.00	0.00
Piutang Pajak Parkir		0.00	0.00
Piutang Pajak Air Tanah		0.00	0.00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		0.00	0.00
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		0.00	0.00
Piutang Retribusi		0.00	0.00
Piutang Retribusi Jasa Umum		0.00	0.00
Piutang Retribusi Jasa Usaha		0.00	0.00

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		0.00	0.00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		3,000,000.00	0.00
Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		0.00	0.00
Piutang Hasil Sewa BMD		0.00	0.00
Piutang Hasil lelang titik reklame		0.00	0.00
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah		0.00	0.00
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		0.00	0.00
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		0.00	0.00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah		0.00	0.00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah		0.00	0.00
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		0.00	0.00
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		0.00	0.00
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		0.00	0.00
Piutang BLUD		3,000,000.00	0.00
Piutang Jasa Layanan Umum BLUD		3,000,000.00	0.00
Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa		3,000,000.00	0.00
Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0.00	0.00
Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0.00	0.00
Piutang Hibah BLUD		0.00	0.00
Piutang Hasil Kerjasama BLUD		0.00	0.00
Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah		0.00	0.00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya		0.00	0.00
Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga		0.00	0.00
Piutang Rekomendasi HGB HPL		0.00	0.00
Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah		0.00	0.00
Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks. BPPN		0.00	0.00
Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun		0.00	0.00
Piutang PDAM Rumah Susun		0.00	0.00
Piutang Listrik Rumah Susun		0.00	0.00
Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)		0.00	0.00
Piutang Pelanggaran atas Izin Mendirikan Bangunan		0.00	0.00
Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0.00	0.00
Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi		0.00	0.00
Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ketiga		0.00	0.00
Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame		0.00	0.00
Piutang Lainnya		0.00	0.00
Uang Muka		0.00	0.00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0.00	0.00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0.00	0.00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0.00	0.00
Piutang Tunjangan DPRD		0.00	0.00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0.00	0.00
Piutang Hubungan Istimewa Kewajiban Setor Surplus Dana BLUD		0.00	0.00
Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi		0.00	0.00
Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga		0.00	0.00
Piutang Hibah		0.00	0.00
Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak Rokok		0.00	0.00

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Penyisihan Piutang Pajak Hotel		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak Restoran		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak Reklame		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak Parkir		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Retribusi		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum		0.00	0.00
Penyisihan Piutang retribusi Jasa Usaha		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Daerah Tak Tertagih		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Denda Retribusi		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		0.00	0.00
Penyisihan Piutang BLUD		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Hibah BLUD		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama BLUD		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Rekomendasi HGB HPL		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Rekomendasi HGB diatas HPL/EKS oleh PT Pembangunan Jaya Ancol sederhana/murah		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pelanggaran atas Izin Mendirikan Bangunan		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ketiga		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Lainnya		0.00	0.00
Penyisihan Uang Muka Kerja		0.00	0.00
Penyisihan Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0.00	0.00
Penyisihan Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0.00	0.00
Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD		0.00	0.00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah		0.00	0.00

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Penyisihan Piutang Hibah		0.00	0.00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan pengembalian UMK pengadaan Trans Jakarta		0.00	0.00
Belanja Dibayar Dimuka		1,621,267.00	38,550,358.00
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka		0.00	0.00
Belanja Barang Dibayar Dimuka		1,621,267.00	38,550,358.00
Belanja Jasa Dibayar Dimuka		0.00	0.00
Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka		0.00	0.00
Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		0.00	0.00
Persediaan		1,062,425,551.00	1,252,411,420.00
Barang Pakai Habis		1,062,425,551.00	1,252,411,420.00
Barang Tak Habis Pakai		0.00	0.00
Barang Bekas Dipakai		0.00	0.00
Jumlah Aset Lancar		1,331,316,595.00	1,445,338,131.00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0.00	0.00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0.00	0.00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		0.00	0.00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta		0.00	0.00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0.00	0.00
Investasi dalam Obligasi		0.00	0.00
Dana Bergulir		0.00	0.00
Dana Bergulir		0.00	0.00
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih		0.00	0.00
Deposito Jangka Panjang		0.00	0.00
Investasi Non Permanen Lainnya		0.00	0.00
Investasi Permanen		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PD Air Minum Jaya		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PD Dharma Jaya		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PD Pembangunan Sarana Jaya		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PD Pasar Jaya		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PD PAL Jaya		0.00	0.00
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Jaya		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Food Station Tjipinang		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Delta Djakarta Tbk		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Jaya Ancol		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Ratax Armada		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Kawasan Berikat Nusantara		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Cemani Toka		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Pakuan International		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Grahasahari Suryajaya		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Asuransi Bangun Askrida		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Propertindo		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Bank DKI Jakarta		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta International Expo		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Tourisindo		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Rumah Sakit Haji		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Transportasi Jakarta		0.00	0.00
Penyertaan Modal kepada PT Penjamin Kredit Daerah		0.00	0.00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		0.00	0.00
ASET TETAP			
Tanah		447,890,625,000.00	447,890,625,000.00
Peralatan dan Mesin		12,043,234,703.00	11,755,475,924.00
Gedung dan Bangunan		0.00	0.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0.00	0.00
Aset Tetap Lainnya		321,807,220.00	321,807,220.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(9,805,140,334.00)	(8,872,151,099.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(9,805,140,334.00)	(8,872,151,099.00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		0.00	0.00

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Akumulasi Penyusutan		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00
Jumlah Aset Tetap		450,450,526,589.00	451,095,757,045.00
DANA CADANGAN		0.00	0.00
ASET LAINNYA			
Tagihan Penjualan Angsuran		0.00	0.00
Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah		0.00	0.00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0.00	0.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0.00	0.00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		0.00	0.00
Kerja Sama Pemanfaatan		0.00	0.00
Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)		0.00	0.00
Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)		0.00	0.00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0.00	0.00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan		0.00	0.00
Aset Tidak Berwujud		0.00	0.00
Goodwill		0.00	0.00
Lisensi dan franchise		0.00	0.00
Hak Cipta		0.00	0.00
Hak Paten		0.00	0.00
Software		0.00	0.00
Aset Tidak Berwujud Lainnya		0.00	0.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0.00	0.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Goodwill		0.00	0.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise		0.00	0.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta		0.00	0.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten		0.00	0.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software		0.00	0.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya		0.00	0.00
Aset Lain-lain		511,517,103.00	1,690,707,150.00
Aset Rusak Berat/Usang		511,517,103.00	1,690,707,150.00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0.00	0.00
Aset Tetap - Belum Validasi		0.00	0.00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0.00	0.00
Aset Tetap - Fasos Fasum		0.00	0.00
Aset Lain-lain di BLUD		0.00	0.00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0.00	0.00
Aset di BP THR Lokasari		0.00	0.00
Aset Lembaga di Biro Dikmental		0.00	0.00
Kas Dikonsinyasikan		0.00	0.00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya		0.00	0.00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0.00	0.00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0.00	0.00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		0.00	0.00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0.00	0.00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(247,039,756.00)	(1,400,811,987.00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		(247,039,756.00)	(1,400,811,987.00)

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0.00	0.00
Jumlah Aset Lainnya		264,477,347.00	289,895,163.00
R/K SKPD		0.00	0.00
RK SKPD Kas		0.00	0.00
RK SKPD Non Kas		0.00	0.00
JUMLAH ASET		452,046,320,531.00	452,830,990,339.00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0.00	0.00
Utang Taspen		0.00	0.00
Utang Taspen		0.00	0.00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0.00	0.00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS		0.00	0.00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS di PPKD		0.00	0.00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS di SPKD/BLUD		0.00	0.00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS		0.00	0.00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS di PPKD		0.00	0.00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS di SPKD/BLUD		0.00	0.00
Utang PPh Pusat		0.00	0.00
Utang PPh 21		0.00	0.00
Utang PPh 21 di SPKD dan PPKD		0.00	0.00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0.00	0.00
Utang PPh 22		0.00	0.00
Utang PPh 22 di SPKD dan PPKD		0.00	0.00
Utang PPh 22 Dana BLUD		0.00	0.00
Utang PPh 23		0.00	0.00
Utang PPh 23 di SPKD dan PPKD		0.00	0.00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0.00	0.00
Utang PPh 26		0.00	0.00
Utang PPh 26 di SPKD dan PPKD		0.00	0.00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0.00	0.00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0.00	0.00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SPKD dan PPKD		0.00	0.00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0.00	0.00
Utang PPN Pusat		0.00	0.00
Utang PPN di SPKD dan PPKD		0.00	0.00
Utang PPN Dana BLUD		0.00	0.00
Utang Taperum		0.00	0.00
Utang Taperum		0.00	0.00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0.00	0.00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0.00	0.00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0.00	0.00
Utang Asuransi		0.00	0.00
Utang BPJS Kesehatan		0.00	0.00
Utang BPJS Ketenagakerjaan		0.00	0.00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lain-lain		0.00	0.00
Utang PFK Lainnya		0.00	0.00
Utang Jaminan		0.00	0.00
Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame		0.00	0.00
Utang Jaminan Penawaran		0.00	0.00
Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan		0.00	0.00
Utang Jaminan KTP Musiman		0.00	0.00
Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas		0.00	0.00
Utang Jaminan Sanggah Banding		0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka		0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0.00	0.00

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame		0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna		0.00	0.00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0.00	0.00
Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD		0.00	0.00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah		0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0.00	0.00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0.00	0.00
Utang Belanja		2,728,203,657.00	5,155,582,537.00
Utang Belanja SKPD		2,728,203,657.00	5,101,972,537.00
Utang Belanja Pegawai		2,728,203,657.00	5,087,104,708.00
Utang Belanja Barang dan Jasa SKPD		0.00	14,867,829.00
Utang Belanja Barang		0.00	0.00
Utang Belanja Jasa		0.00	14,867,829.00
Utang Belanja Jasa Non TALI		0.00	0.00
Utang Belanja TALI		0.00	14,867,829.00
Utang Belanja Pemeliharaan		0.00	0.00
Utang Belanja Perjalanan Dinas		0.00	0.00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		0.00	0.00
Utang Belanja Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0.00	0.00
Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta		0.00	0.00
Utang Belanja Subsidi		0.00	0.00
Utang Belanja Hibah		0.00	0.00
Utang Belanja Modal SKPD		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Tanah		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00
Utang Belanja BLUD		0.00	53,610,000.00
Utang Belanja Pegawai BLUD		0.00	0.00
Utang Belanja Barang Jasa BLUD		0.00	53,610,000.00
Utang Belanja Modal BLUD		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Tanah BLUD		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD		0.00	0.00
Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD		0.00	0.00
Utang Hub. Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0.00	0.00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0.00	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0.00	0.00
Utang Kompensasi Pajak		0.00	0.00
Utang Restitusi Pajak		0.00	0.00
Utang Hub. Istimewa Kewajiban Setor Surplus Dana BLUD		0.00	0.00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0.00	0.00
Utang Jaminan		0.00	0.00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0.00	0.00
Utang Jaminan BLUD		0.00	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2,728,203,657.00	5,155,582,537.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0.00	0.00
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		0.00	0.00

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)		0.00	0.00
JICA SLA.... (Proyek MRT)		0.00	0.00
Utang PEN		0.00	0.00
Utang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00
Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		0.00	0.00
Utang Dalam Negeri Sektor Non Perbankan		0.00	0.00
Utang Dalam Negeri - Obligasi Daerah		0.00	0.00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri		0.00	0.00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Menengah		0.00	0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0.00	0.00
Utang Jangka Panjang di BLUD		0.00	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN		2,728,203,657.00	5,155,582,537.00
EKUITAS - LO		374,086,547,918.00	447,675,407,802.00
RK PPKD		75,231,568,956.00	0.00
RK PPKD Kas		75,481,269,872.00	0.00
RK PPKD Non Kas		(249,700,916.00)	0.00
JUMLAH EKUITAS		449,318,116,874.00	447,675,407,802.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		452,046,320,531.00	452,830,990,339.00

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA (GABUNGAN)
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIPTAHULLOH TAMARY
NIP 19781213199711101



LAPORAN ARUS KAS
TAHUN ANGGARAN 2021
Per 31 DESEMBER 2021

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021 Audited (Rp)	31 Desember 2020 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Pajak Daerah		0.00	0.00
Penerimaan Retribusi daerah		0.00	0.00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0.00	0.00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		781,334,249.00	154,376,353.00
Penerimaan Operasional BLUD		781,334,249.00	154,376,353.00
Jumlah Arus Kas Masuk		781,334,249.00	154,376,353.00
Arus Kas Keluar :			
Pembayaran Pegawai		0.00	0.00
Pembayaran Barang		671,440,825.00	0.00
Pengeluaran Operasional BLUD		671,440,825.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar		671,440,825.00	0.00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		109,893,424.00	154,376,353.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk :			
Penjualan atas Tanah		0.00	0.00
Penjualan atas Brandgang		0.00	0.00
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai		0.00	0.00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0.00	0.00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00
Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk		0.00	0.00
Arus Kas Keluar :			
Pembentukan Dana Cadangan		0.00	0.00
Perolehan Tanah		0.00	0.00
Perolehan Peralatan dan Mesin		0.00	0.00
Perolehan Gedung dan Bangunan		0.00	0.00
Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0.00	0.00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0.00	0.00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar		0.00	0.00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>		0.00	0.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk :			
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2018)		0.00	0.00
Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan		0.00	0.00
Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak TA.2019		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk		0.00	0.00
Arus Kas Keluar :			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan		0.00	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2020)		0.00	0.00
Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga (Akhir Tahun)		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar		0.00	0.00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>		0.00	0.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Uang Jaminan		0.00	0.00
Penerimaan Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga		0.00	0.00
Kompensasi Kelebihan Bayar Pajak Tahun 2019		0.00	0.00
Reklasifikasi Uang Jaminan BLUD ke Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya		0.00	0.00
Penerimaan Deposit Pasien		0.00	0.00
Penerimaan Uang Muka Jasa BLUD		0.00	0.00
Penerimaan Uang Titipan		0.00	0.00
Penerimaan UMK BLUD		0.00	0.00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0.00	0.00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Pajak		0.00	0.00
Penerimaan Non Pajak		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk		0.00	0.00
Arus Kas Keluar :			
Hasil Eksekusi atas Jaminan		0.00	0.00
Penyetoran Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran ke Kas Daerah		0.00	0.00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0.00	0.00
Kelebihan Setoran Pajak BLUD		0.00	0.00

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021 Audited (Rp)	31 Desember 2020 Audited (Rp)
Pengembalian Deposit Pasien		0.00	0.00
Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD		0.00	0.00
Pengembalian Uang Titipan		0.00	0.00
Pembayaran UMK BLUD		0.00	0.00
Penyetoran Penutupan BLUD		0.00	0.00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		0.00	0.00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Pajak		0.00	0.00
Pengeluaran Non Pajak		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar		0.00	0.00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>		0.00	0.00
KOREKSI SILPA		0.00	0.00
KOREKSI/TRANSFER SALDO AWAL KAS BLUD		0.00	0.00
Kenaikan (Penurunan) Kas		109,893,424.00	154,376,353.00
Saldo Awal Kas BLUD		154,376,353.00	0.00
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas BLUD		264,269,777.00	154,376,353.00

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH TAMARY
NIP 19781213199711101

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (GABUNGAN)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021 Audited (Rp)	31 Desember 2020 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Pajak Daerah		0.00	0.00
Penerimaan Retribusi daerah		0.00	0.00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0.00	0.00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		781,334,249.00	154,376,353.00
Penerimaan Operasional BLUD		781,334,249.00	154,376,353.00
Jumlah Arus Kas Masuk		781,334,249.00	154,376,353.00
Arus Kas Keluar :			
Pembayaran Pegawai		0.00	0.00
Pembayaran Barang		671,440,825.00	0.00
Pengeluaran Operasional BLUD		671,440,825.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar		671,440,825.00	0.00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		109,893,424.00	154,376,353.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk :			
Penjualan atas Tanah		0.00	0.00
Penjualan atas Brandgang		0.00	0.00
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai		0.00	0.00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0.00	0.00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00
Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk		0.00	0.00
Arus Kas Keluar :			
Pembentukan Dana Cadangan		0.00	0.00
Perolehan Tanah		0.00	0.00
Perolehan Peralatan dan Mesin		0.00	0.00
Perolehan Gedung dan Bangunan		0.00	0.00
Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0.00	0.00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0.00	0.00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar		0.00	0.00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>		0.00	0.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk :			
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2018)		0.00	0.00
Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan		0.00	0.00
Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak TA.2019		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk		0.00	0.00
Arus Kas Keluar :			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan		0.00	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2020)		0.00	0.00
Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga (Akhir Tahun)		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar		0.00	0.00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>		0.00	0.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Uang Jaminan		0.00	0.00
Penerimaan Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga		0.00	0.00
Kompensasi Kelebihan Bayar Pajak Tahun 2019		0.00	0.00
Reklasifikasi Uang Jaminan BLUD ke Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya		0.00	0.00
Penerimaan Deposit Pasien		0.00	0.00
Penerimaan Uang Muka Jasa BLUD		0.00	0.00
Penerimaan Uang Tilipan		0.00	0.00
Penerimaan UMK BLUD		0.00	0.00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0.00	0.00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Pajak		0.00	0.00
Penerimaan Non Pajak		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk		0.00	0.00
Arus Kas Keluar :			
Hasil Eksekusi atas Jaminan		0.00	0.00
Penyetoran Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran ke Kas Daerah		0.00	0.00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0.00	0.00
Kelebihan Setoran Pajak BLUD		0.00	0.00

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021 Audited (Rp)	31 Desember 2020 Audited (Rp)
Pengembalian Deposit Pasien		0.00	0.00
Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD		0.00	0.00
Pengembalian Uang Titipan		0.00	0.00
Pembayaran UMK BLUD		0.00	0.00
Penyetoran Penutupan BLUD		0.00	0.00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0.00	0.00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Pajak		0.00	0.00
Pengeluaran Non Pajak		0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar		0.00	0.00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>		0.00	0.00
KOREKSI SILPA		0.00	0.00
KOREKSI/TRANSFER SALDO AWAL KAS BLUD		0.00	0.00
Kenaikan (Penurunan) Kas		109,893,424.00	154,376,353.00
Saldo Awal Kas BLUD		154,376,353.00	0.00
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas BLUD		264,269,777.00	154,376,353.00

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH TAMARY
NIP 19781213199711101



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Per 31 DESEMBER 2021**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BPSDM Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Gabungan Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP).

Tahun Anggaran 2021, berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas



pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

1.1.2 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

1.1.3 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

1.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.1.5 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 BPSDM Provinsi DKI Jakarta adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



1.2 Landasan hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021



- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
- k. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- l. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013;
- m. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- n. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis AkruaI;
- p. Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI;
- q. Peraturan Gubernur Nomor 293 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai;
- r. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- s. Peraturan Gubernur Nomor 1375 Tahun 2018 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- t. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017;



- u. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- v. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik;
- w. Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021. tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi/Terpadu di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (*Jakarta Corporate University*).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk Tahun Anggaran 2021 menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target, peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos Pendapatan – LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas yang timbul dengan menggunakan basis akrual;
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 BPSDM Provinsi DKI Jakarta disajikan dengan urutan sebagai berikut:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021



-
- Bab I Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- Bab III Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Bab V Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.
- Bab VI Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
- Bab VII Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan.



BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

2.1 Ekonomi Makro

Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* yang melanda seluruh dunia mengakibatkan kontraksi pada sektor perekonomian. Perekonomian DKI Jakarta mencerminkan perekonomian Nasional sehingga pergerakan yang terjadi pada perekonomian DKI Jakarta akan mempengaruhi perekonomian Nasional. Namun demikian perekonomian DKI Jakarta juga tergantung pada perkembangan perekonomian global. Aktifitas perekonomian di Jakarta menunjukkan pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta terkontraksi dari tahun sebelumnya. Penurunan aktifitas ekonomi terjadi pada hampir seluruh komponen pengeluaran kecuali konsumsi pemerintah serta pada beberapa lapangan usaha utama. Berbagai kebijakan pemulihan ekonomi baik dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah provinsi DKI Jakarta menahan penurunan kinerja ekonomi lebih lanjut. Rendahnya capaian inflasi membawa tingkat inflasi Jakarta pada akhir tahun 2021 lebih rendah dari tahun sebelumnya dan di bawah kisaran sasaran inflasi nasional tahun 2021, yaitu 3% \pm 1%.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Jakarta. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada aspek belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan Pendapatan Daerah. Rencana Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan kajian yang



BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

2.1 Ekonomi Makro

Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* yang melanda seluruh dunia mengakibatkan kontraksi pada sektor perekonomian. Perekonomian DKI Jakarta mencerminkan perekonomian Nasional sehingga pergerakan yang terjadi pada perekonomian DKI Jakarta akan mempengaruhi perekonomian Nasional. Namun demikian perekonomian DKI Jakarta juga tergantung pada perkembangan perekonomian global. Aktifitas perekonomian di Jakarta menunjukkan pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta terkontraksi dari tahun sebelumnya. Penurunan aktifitas ekonomi terjadi pada hampir seluruh komponen pengeluaran kecuali konsumsi pemerintah serta pada beberapa lapangan usaha utama. Berbagai kebijakan pemulihan ekonomi baik dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah provinsi DKI Jakarta menahan penurunan kinerja ekonomi lebih lanjut. Rendahnya capaian inflasi membawa tingkat inflasi Jakarta pada akhir tahun 2021 lebih rendah dari tahun sebelumnya dan di bawah kisaran sasaran inflasi nasional tahun 2021, yaitu 3% \pm 1%.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Jakarta. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada aspek belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan Pendapatan Daerah. Rencana Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan kajian yang

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021



mendalam serta mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Adapun dasar pertimbangan asumsi perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah:

1. Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan simulasi pada komponen pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah) dengan menggunakan model Statistika. Dalam simulasi tersebut, variabel-variabel penjelas/penentu (*exogeneous*) yang diperkirakan mempengaruhi besaran pendapatan daerah dimasukkan ke dalam model untuk memperkirakan masing-masing komponen pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dan pendapatan lainnya. Selanjutnya berdasarkan komponen pendapatan tersebut dibuat perkiraan total Pendapatan daerah dengan menggunakan persamaan simultan.
2. Adanya stabilitas politik, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat yang lebih baik, sehingga kondisi ini diharapkan dapat mendukung berbagai aktivitas ekonomi di Jakarta.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2021 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga difokuskan pada belanja untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta belanja untuk memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang sifatnya wajib dan mengikat.



Pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tetap. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisien dan efektif. Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural dengan target capaian kinerja 99,85%;
2. Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang Kompetensi Dasar dan Manajerial serta Fungsional dengan target pencapaian 94,79%.
3. Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang Kompetensi Teknis dan Fungsional dengan target pencapaian 100%.
4. Persentase SDM Aparatur yang mendapatkan Sertifikasi Profesi dengan target pencapaian 99,99%.
5. Akreditasi Pengelolaan Diklat dengan target pencapaian 4 jenis diklat.
6. Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor dengan target pencapaian 4 indeks.
7. Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional dengan target pencapaian 4 indeks.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka sejak Tahun 2012 Pemerintah DKI Jakarta telah menganut anggaran defisit.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 BPSDM Provinsi DKI Jakarta, dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dan UPT Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik pada Tahun Anggaran 2021 masing-masing ditargetkan sebesar Rp0,- dan Rp450.440,000,-. Adapun rincian pendapatan daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Pendapatan Daerah

No.	Uraian	Target (Rp)	Target (APBD-P)	Realisasi (Rp)
I	Retribusi :	-	-	-
II	UPT PPKKP			
1	Peningkatan Layanan Umum Daerah (PLUD) - Jasa Layanan	200.000.000	450.440.000	412.888.000
2	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah (Jasa Giro Bank)	-	-	18.846.249
3	Pendapatan Hibah	-	-	349.600.000
	Jumlah	200.000.000	450.440.000	781.334.249

Penjelasan :

Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 DPA BPSDM Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki retribusi ditargetkan 0.

Sementara pada UPT PPKKP, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 450.440.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran tercatat sebesar Rp 781.334.249,- atau melebihi target sebesar Rp 330.849.249,- atau 73,46%.

3.1.2 Belanja Daerah

Kinerja Belanja Daerah BPSDM Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2021 Tahun Anggaran 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Keterangan	APBD Murni	APBD Perubahan	Realisasi	%
BELANJA DAERAH	105.174.002.721	77.770.964.499	76.152.710.697	97,92
BELANJA OPERASIONAL	105.174.002.721	76.979.024.856	75.412.284.697	97,96
Belanja Pegawai	68.505.379.707	51.652.511.866	50.778.250.497	98,31
Belanja Barang dan Jasa	36.668.623.014	25.326.512.990	24.634.034.200	97,27

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



BELANJA MODAL	791.939.643	791.939.643	740.426.000	93,50
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	791.939.643	791.939.643	740.426.000	93,50

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp77.770.964.499,- Realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 76.152.710.697,-. atau 97,92 % atau tidak diserap sebesar Rp 1.618.253.802,- atau 2,13 %.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp791.939.643,- Realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 740.426.000,- atau 93,50 % atau tidak diserap sebesar Rp 51.513.643,- atau 6,96 %.

3.2 Hambatan dan Kendala

Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta antara lain :

- a. Terjadinya wabah Covid 19 sejak tahun 2020 sampai saat ini, APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan pendapatan sehingga berpengaruh terhadap belanja operasional.
- b. Pada Tahun Anggaran 2021 BPSDM Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tetap melaksanakan kegiatan walaupun kondisi covid-19, yaitu melalui pembelajaran jarak jauh zoom meeting, daring dalam rangka pengembangan kompetensi.
- c. UPT Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik ada beberapa pelaksanaan program kegiatan tidak berjalan secara optimal, khususnya pada penyelenggaraan pelatihan berbayar yang menjadi jasa layanan.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan etitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021



dilakukan selama periode berjalan. sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Pengelola Keuangan Daerah

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021



Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan SKPD selaku entitas akuntansi sebanyak 732 SKPD/UKPD. Selanjutnya sejumlah 732 Laporan Keuangan SKPD digabung menjadi 43 entitas akuntansi penggabung. Laporan Keuangan SKPD entitas akuntansi penggabung merupakan gabungan dari laporan keuangan UKPD dibawahnya.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Administrasi/Kabupaten merupakan gabungan dari Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan Suku Dinas dan Unit Pelayanan Teknis menginduk pada Dinas. Khusus untuk Dinas Kesehatan selain menggabungkan laporan keuangan Suku Dinas juga menggabungkan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas. Laporan Keuangan Biro-Biro menginduk pada SKPD Sekretaris Daerah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1600 Tahun 2019 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Proses konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang ada antara SKPD dengan SKPD lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. SKPD menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan seluruh laporan keuangan UKPD yang secara organisatoris berada dibawahnya. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan

anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris beradadi bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan – LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sementara penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan disajikan berdasarkan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam penyajian Neraca, pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
3. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA dikelompokan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021



kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, Dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, Dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

1. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow.
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021



Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO secara umum dicatat:

1. sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021



2. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi. Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.

Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
2. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
3. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga.
4. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021



2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria belanja modal akan diperlakukan sebagai persediaan yang terdiri dari persediaan pakai habis dan Persediaan tidak memenuhi batas kapitalisasi (*ekstra komptabel*). Persediaan pakai habis adalah belanja barang yang tidak memenuhi salah satu kriteria aset tetap. Persediaan ekstra komptabel adalah belanja barang yang memenuhi kriteria aset tetap namun nilai perolehan berada di bawah batas kapitalisasi.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kedua kriteria poin (a) dan (b) sebagai berikut:

a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

- 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
- 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
- 3) bertambah volume, dan/atau
- 4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- 5) bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.

b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

4.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar



atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

4.3.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

b. Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

1. pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
2. konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).

c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021



lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari Beban Operasi-LO: beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain, Beban transfer: Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Beban Transfer Bantuan, Beban Transfer Dana Otonomi Khusus, Defisit Non Operasional, Beban Luar Biasa.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non



operasional lainnya. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud sejak Tahun 2015, dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

4.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang diakui dan / atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan dalam bentuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset lainnya dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Aset Lancar

- a. Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Aset Lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

- c. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas yang berupa valuta asing dikonversi ke rupiah berdasarkan kurs pada tanggal neraca.
- d. Piutang adalah tagihan kepada pihak ke tiga yang akan diterima pembayarannya pada masa yang akan datang dalam kurun waktu 12 bulan. Piutang dinilai berdasarkan nilai nominal yang akan diterima pada tanggal jatuh tempo. Tidak ada kebijakan untuk penyisihan piutang tak tertagih.
- e. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dengan maksud untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau diserahkan / dijual kepada masyarakat dalam waktu satu tahun. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventaris fisik (stock opname).

2) Investasi

- a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicaikan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

3) Aset tetap

a. Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

b. Aset tetap terdiri dari :

- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan bangunan
- Jalan, Irigasi dan jaringan
- Aset tetap lainnya
- Kontruksi dalam pengerjaan

c. Penilaian Aset Tetap

Penilaian barang aset tetap untuk pengadaan Tahun Anggaran 2015 dinilai dengan menghitung biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran,

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021



penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

- 3) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- 4) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.
- 5) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- 6) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- 7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat di distribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu

aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

4) Aset Tetap Lainnya

- a. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.
- b. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/ buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga serta hewan/ternak dan tumbuhan.

5) Aset Lainnya

- a. Aset lainnya digunakan untuk menyajikan aset yang tidak masuk dalam kelompok aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Aset lainnya mencakup Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Lain-lain.
- b. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan dengan Pihak Ketiga.
- c. Contoh dari Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang sudah dihentikan penggunaannya dikarenakan rusak tetapi belum ada Surat Keputusan Penghapusan.

4.3.6 Kewajiban

- a. Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021



konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

- b. Penyajian utang pemerintah di neraca dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- c. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk Daftar Jadwal Utang untuk memberikan informasi yang lebih baik mengenai kewajiban pemerintah.
- d. Utang dicatat sebesar nilai nominal. Pada setiap tanggal neraca, utang dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.

4.3.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:



- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Penyusunan pos-pos Laporan Keuangan Gabungan BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 sudah menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum, dengan cara menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan.

Penyajian informasi pada pelaporan keuangan ini belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kebijakan Akuntansi atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan Akuntansi tentang penyusutan aset tetap



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 133 tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan BPSDM Provinsi DKI Jakarta adalah laporan keuangan SKPD/UKPD sebagai entitas akuntansi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1292 Tahun 2020 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2020.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021



Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan kontraksi perekonomian yang berdampak terhadap APBD Tahun Anggaran 2021. Pemerintah pusat merespons kondisi ini dengan mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dengan melakukan penyesuaian anggaran yang signifikan akibat dampak pandemi Covid-19 pada penetapan APBD-P Tahun Anggaran 2020. Pandemi Covid-19 berdampak pada turunnya realisasi beberapa pos pendapatan dan belanja daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 jika dibandingkan dengan realisasi APBD tahun sebelumnya.

5.1.1 Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2021 Pendapatan terbagi menjadi dua yaitu Pendapatan UPT Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik dan pendapatan retribusi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dapat disajikan pada tabel 5.1.1 :

Tabel 5.1.1
Rekapitulasi Pendapatan
Retribusi dan UPT PPKKP

No.	Uraian	Target (Rp)	Target (APBD-P)	Realisasi (Rp)
I	Retribusi :			
1	Retribusi Diklat Kepemimpinan	-	-	-
2	Retribusi Diklat Teknis Fungsional	-	-	-
3	Retribusi Diklat Prajabatan	-	-	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021



II	UPT PPKKP			
1	Peningkatan Layanan Umum Daerah (PLUD) - Jasa Layanan	200.000.000	450.440.000	784.334.249
2	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah (Jasa Giro Bank)	-	-	-
	J u m l a h	200.000.000	450.440.000	781.334.249

Penjelasan :

Pada Tahun Anggaran 2021 DPA BPSDM Provinsi DKI Jakarta untuk pendapatan retribusi tidak memiliki target, karena situasi wabah covid-19, adapun dalam pengembangan kompetensi dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh(e-learning).

UPT PPKKP pada Tahun Anggaran 2021 target Rp 450.440.000 pada realisasi per 31 Desember 2021 melebihi target sebesar Rp 784.334.249 dengan capaian 174,13%.

Dilihat dari tabel di atas Realisasi Pendapatan UPT Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik (UPT PPKKP) melebihi target yang di tetapkan. Hal ini terjadi karena adanya potensi Pendapatan dari jasa layanan (Diklat Calon Kepala Sekolah) setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBDP).

Terdapat lain-lain pendapatan BLUD yang sah yang di terima setiap bulan dari Jasa Giro rekening bendahara penerimaan BLUD, adanya pendapatan royalti penjualan buku "Menyelami Pasar Tanah Abang" yaitu sebesar Rp198.135,- dan penerimaan pembayaran biaya publikasi media elektronik penyelenggaraan kegiatan Podcast Rabu belajar sebesar Rp 17.108.850,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021



UPT Pusat Pengembangan Kompetensi dan kebijakan Publik juga menerima hibah dari Bank DKI untuk dana sponsorship Penerbitan Buku Implementasi Kebijakan, Laporan dan Studi Kasus di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pembayaran dana sponsorship penerbitan buku implementasi, kebijakan, Laporan dan studi kasus di lingkungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp250.000.000,- dilakukan dengan Rp 17.108.850,-

UPT Pusat Pengembangan Kom 26 Maret 2021 dan tahap kedua di terima tanggal 14 Juni 2021 dan telah dicetak buku dengan Judul:

1. "Menyelami Pasar Tanah Abang" Buku tersebut dicetak dengan Perjanjian Kerjasama dengan PT Balai Pustaka.
2. "Memacu Semangat Memajukan Jakarta" dicetak dengan Perjanjian Kerjasama dengan PT Balai Pustaka.
3. "Tangguh Menghadapi Pandemi Maju dengan Kolaborasi" dicetak dengan Perjanjian Kerjasama dengan PT Balai Pustaka.
4. "Resilienci in Resolving the Pandemic Moving Forward Through Collaboration" buku ini dan bentuk buku digital kerjasama dengan PT Elex Media Computation.
5. "Public Policy Case Studies, Volume One Mindset Approach and Impact".
6. Desain cover buku animasi konten, infografis dan tata letak naskah.

Selain dari Bank DKI UPT Pusat pengembangan Kompetensi dan kebijakan Publik juga menerima Hibah Dana Sponsorship dari PT. Transportasi Jakarta sebesar Rp99.600.000,- untuk Riset evaluasi dampak penggunaan mikrotrans sebagai bagian dari Jaklingko bagi masyarakat Jakarta. Dana hibah ini diterima tanggal 27 Agustus 2021

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



sesuai nota kesepakatan No.427/PJ-PT.TJ/V/2021 Tanggal 21 Juni 2021.

5.1.2 Belanja

Realisasi belanja BPSDM Provinsi DKI Jakarta sampai dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp.76.152.710.697,- atau 97,92% dari total anggaran belanja 2021 sebesar Rp.77.770.964.499,- Rincian realisasi belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Rincian realisasi Belajar BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan pada tabel 5.1.2 :

Tabel 5.1.2
Realisasi Belanja Operasi
BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian
1	Belanja Pegawai	51.652.511.866	50.778.250.497	98,31%
2	Belanja Barang dan Jasa	25.326.512.990	24.634.034.200	97,27%
	J u m l a h	76.979.024.856	75.412.284.697	97,96%

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021



objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp51.652.511.866,- Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp50.778.250.497,- atau 98,31%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp 874.261.369,- atau 1,72%.

Apabila realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp30.717.799.637,- terdapat kenaikan realisasi di tahun 2021 sebesar Rp20.060.450.860,- atau 39,51%. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp50.778.250.497,- di antaranya berasal dari realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp25.326.512.990,-. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp24.634.034.200,- atau 97,27%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp692.478.790,- atau 2,81%.

Apabila realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp20.405.381.725,- terdapat kenaikan realisasi di tahun 2021 sebesar Rp4.228.652.475,- atau 17,17%.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021



Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa yang tercatat di antaranya adalah:

- 1) Realisasi Barang Pakai Habis sebesar Rp836.498.029,- diantaranya adalah :
 - a) Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas sebesar Rp 62.523.780,-
 - b) Belanja bahan-bahan lainnya sebesar Rp62.523.780,-
 - c) Belanja suku cadang alat kedokteran sebesar Rp 21.851.500,-
 - d) Belanja suku cadang alat studio dan komunikasi sebesar Rp 3.657.500,-
 - e) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor sebesar Rp 176.509.000,-
 - f) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak sebesar Rp 70.730.000,-
 - g) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat listrik sebesar Rp 10.975.250,-
 - h) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp 6.710.000,-
 - i) Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 407.009.000,-
 - j) Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebesar Rp 11.683.999,-
- 2) Realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp 6.260.562.821,- diantaranya adalah :
 - a) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator pembawa acara sebesar Rp 2.508.364.375,-
 - b) Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana sebesar Rp 22.400.000,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021



- c) Belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp 11.913.800,-
 - d) Belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp 135.000.000,-
 - e) Belanja jasa tenaga kebersihan sebesar Rp 1.565.985.791,-
 - f) Belanja jasa tenaga keamanan sebesar Rp 1.148.120.249,-
 - g) Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebesar Rp 233.228.098,-
 - h) Belanja tagihan telepon sebesar Rp 9.194.042,-
 - i) Belanja tagihan air sebesar Rp 9.123.315,-
 - j) Belanja tagihan listrik sebesar Rp 140.833.151,-
 - k) Belanja kawat/faksimil/internet/TV berlangganan sebesar Rp 176.400.000,-
- 3) Belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp 258.556.518,- diantaranya adalah :
- a) Belanja sewa alat reproduksi(penggandaan) sebesar Rp 178.574.946,-
 - b) Belanja sewa peralatan komputer lainnya sebesar Rp 76.956.572,-
- 4) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebesar Rp 213.457.000,- diantaranya adalah :
- a) Belanja jasa konsultasi layanan jasa khusus sebesar Rp 108.957.000,-
 - b) Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang telematika sebesar Rp 104.500.000,-
- 5) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebesar Rp 14.620.646.121,- diantaranya adalah :
- a) Belanja beasiswa tugas belajar S2 belajar sebesar Rp 14.260.572.121,-
 - b) Belanja beasiswa tugas belajar S3 sebesar Rp 360.074.000,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021



- 6) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp 1.537.415.000,- diantaranya adalah :
 - a) Belanja kursus singkat/pelatihan sebesar Rp 1.537.425.000,-
- 7) Belanja pemeliharaan peralatan mesin sebesar Rp 180.200.386,- diantaranya adalah :
 - a) Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp 36.878.636,-
 - b) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat kantor lainya sebesar Rp 141.163.000,-
 - c) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat pendingin Rp 2.158.750,-
- 8) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp 43.037.500,- diantaranya adalah :
 - a) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja –bangunan gedung kantor sebesar Rp 43.037.500,-
- 9) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp 12.220.000,- diantaranya adalah :
 - a) Belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp 12.220.000,-
- 10) Belanja barang dan jasa BLUD (dana BLUD) sebesar Rp 671.440.825,- diantaranya adalah :
 - a) Pembayaran hutang narasumber kegiatan tahun 2020 sebesar Rp 52.610.000,-
 - b) Penerbitan buku hibah dari bank DKI sebesar Rp 250.000.000,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021



- c) Riset evaluasi dampak penggunaan mikrotrans sebagai bagian dari Jaklingko bagi masyarakat Jakarta sebesar Rp 99.600.000,-
- d) Workshop social media engagement strategis for government sebesar Rp 1.000.000,-
- e) Public training latsar CPNS sebesar Rp 25.900.000,-
- f) Workshop dan training dengan tema public policy for the business sebesar Rp 1.323.300,-
- g) Diklat calon kepala sekolah besar Rp 240.745.570,-
- h) Pembayaran royalty penulis buku menyelami pasar tanah abang sebesar Rp 261.955,-

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp791.939.643,-. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp740.426.000,- atau 93,50%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp51.513.643,- atau 6,96%.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021



Tabel 5.1.2.2
Realisasi Belanja Modal
BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian
1	Belanja Peralatan dan Mesin	791.939.643	740.426.000	93,50 %
	Jumlah	791.939.643	740.426.000	93,50 %

Belanja peralatan dan mesin yang tersaji pada laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja modal yang tercatat di antaranya adalah:

- 1) Realisasi belanja peralatan dan mesin sebesar Rp740.426.000,- diantaranya adalah :
 - a) Belanja modal alat kantor lainnya sebesar Rp 114.300.000,-
 - b) Belanja modal alat pendingin sebesar Rp 5.192.000,-
 - c) Belanja modal peralatan studio audio sebesar Rp 131.430.000,-
 - d) Belanja modal peralatan studio gambar sebesar Rp 37.775.000,-
 - e) Belanja modal alat studio lainnya sebesar Rp 34.717.500,-
 - f) Belanja modal personal komputer sebesar Rp 360.167.500,-
 - g) Belanja modal peralatan komputer lainnya sebesar Rp 56.844.000,-

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Anggaran Lebih (SAL) merupakan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan dan dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021



Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran (SAL) Lebih per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 75.481.269.872,- dengan rincian mutasi sebagai berikut :

SAL per 31 Desember 2020		Rp	154.376.353,-
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan		(Rp)	<u>154.376.353,-</u>
	Subtotal	Rp	0,-
Pendapatan	Rp 781.334.249,-		
Belanja	<u>(76.152.710.697)</u>		
Defisit		(Rp)	75.371.376.448)
Penerimaan Pembiayaan	Rp 154.376.353,-		
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,-</u>		
Pembiayaan Netto		Rp	<u>154.376.353,-</u>
SiLPA Tahun 2021 sebelum penyesuaian		Rp	75.217.000.095,-
SiLPA dana BLUD		Rp	<u>264.269.777,-</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir – Dana Subsidi		Rp	75.481.269.872,-

5.3 Laporan Operasional (LO)

Laporan Keuangan BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.



Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5.3.1 Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah.

Pendapatan - LO BPSDM Provinsi DKI Jakarta pada UPT Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik sampai dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 781.334.249,- . Rincian realisasi Pendapatan - LO tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021



Tabel 5.2.1
Pendapatan – LO BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
	SKPD	
1	Pendapatan Pajak	0,-
2	Pendapatan Retribusi	0,-
3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,-
4	Lain-lain PAD	0,-
	BLUD	
5	4.1.4.12.01 Jasa Layanan	415.888.000,-
6	4.1.4.12.02 Hasil kerja sama dengan pihak lain	0,-
7	4.1.4.12.03 Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	18.846.249,-
8	4.1.4.12.04 Hibah	349.600.000,-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	784.334.249,-

Jika dilihat dari realisasi Pendapatan – LO, maka UPT Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik BPSDM Provinsi DKI Jakarta mengalami Surplus sebesar Rp. 330.894.249,- atau sebesar 130,53%.

5.3.2 Beban

Beban yang terdapat pada Laporan Operasional merupakan beban yang diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban – LO BPSDM Provinsi DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 71.602.269.476,-. Rincian realisasi Beban - LO tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021



Tabel 5.2.2
Beban Laporan Operasional
BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
	BEBAN OPERASIONAL	
1	Beban Pegawai per 31 Desember 2021 Rp. 45.691.145.789,-	
	Utang Belanja per 30 Desember 2020 Rp. (0,-)	
	Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2021	45.691.145.789,-
2	Beban Barang dan Jasa	
	A. Beban Barang – Non BLUD Rp 1.681.243.814,-	
	Jumlah Beban Barang per 31 Desember 2021	1.681.243.814,-
	B. Beban Jasa Rp. 22.875.769.631,-	
	Utang Belanja per 31 Desember 2021 (Rp. 0,-)	
	Jumlah Beban Jasa per 31 Desember 2021	22.875.769.631,-
	C. Beban Pemeliharaan	223.237.886,-
	D. Beban Perjalanan Dinas	12.220.000,-
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.18.652.356,-
4	Beban Penyisihan Piutang	0,-
5	Beban Lain-lain	0,-
	Jumlah Beban per 31 Desember 2021	71.602.269.476,-

Jika dilihat dari realisasi Pendapatan – LO dan Beban – LO, maka BPSDM Provinsi DKI Jakarta mengalami Defisit - LO sebesar Rp. 71.602.269.476,-.

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal 1 Januari 2021 BPSDM Provinsi DKI Jakarta diperoleh dari Ekuitas – LO per 31 Desember 2020 ditambah dengan RK PPKD per 31

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021



Desember 2019. Ekuitas – LO per 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 447.675.407.802,- yang diperoleh dengan cara menjumlahkan Ekuitas – LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 397.930.443.623,- ditambahkan RK PPKD per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 49.744.964.179,-. Sehingga jumlah Ekuitas Awal pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta sebesar **Rp. 447.675.407.802,-**.

5.4.2 Perubahan Ekuitas

Perubahan Ekuitas BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat dihitung dengan cara menjumlahkan Surplus / Defisit LO, Mutasi RK PPKD, dan Koreksi Ekuitas BPSDM Provinsi DKI Jakarta untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021. Rincian perhitungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Surplus/Defisit LO

Jika dilihat dari perhitungan Laporan Operasional di atas, maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2021 BPSDM Provinsi DKI Jakarta mengalami Defisit LO sebesar Rp. 70.817.935.227,-.

2. Mutasi RK PPKD

Mutasi RK PPKD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 75.231.568.956,-

3. Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas BPSDM Provinsi DKI Jakarta untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 42.721.000,- yang terdiri dari :

KOREKSI PENAMBAHAN :

- Koreksi Aset Tetap dan Lain-lain	Rp.	0,-
Transfer Masuk dari SKPD Lain	Rp.	0,-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp.	0,-
Koreksi Kurang Catat Barang Aset Tetap Dan Aset Lainnya	Rp.	0,-
Koreksi Penambahan Lain-lain	Rp.	0,-
Koreksi Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap	Rp.	0,-
- Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi		
Koreksi Lebih Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	0,-
Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya Ke Ekstrakomtabel	Rp.	0,-
- Penyisihan atas Piutang yang Terbayar	Rp.	0,-
- Lain-lain	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah Koreksi Penambahan	Rp.	0,-

KOREKSI PENGURANGAN :

- Koreksi Aset Tetap dan Lain-lain	Rp.	0,-
Transfer Keluar ke SKPD Lain	Rp	0,-
Koreksi atas Belanja Modal TA 2021 (Temuan, Denda, dll)	Rp.	0,-
Koreksi atas Belanja Modal TA 2021 (Temuan, Denda, dll)	Rp.	0,-
Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp.	0,-
Koreksi Lebih Catat Barang	Rp.	0,-
Koreksi Pengurangan Lain-lain	Rp.	0,-
- Koreksi Kurang Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/Koreksi Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	0,-
- Akumulasi Penyusutan Aset Transfer Masuk	Rp.	0,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021



dari SKPD lain	
- Lain-lain	Rp. 42.721.000,-
Jumlah Koreksi Ekuitas	(Rp. 42.721.000,-)

Terdapat koreksi pengurangan ekuitas lain-lain sebesar Rp 42.721.000,-. Maka Jumlah Perubahan Ekuitas BPSDM Provinsi DKI Jakarta untuk periode 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 4.370.912.729,-

5.4.3 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021 BPSDM Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 452.046.320.531,- yang diperoleh dari Ekuitas LO Akhir ditambah dengan RK PPKD. Rincian perhitungan sebagai berikut :

Ekuitas – LO Akhir	
- Ekuitas – LO Awal	Rp. 447.675.407.802,-
- Surplus/Defisit LO	(Rp. 70.817.935.227,-)
- Koreksi Ekuitas	(Rp. <u>42.721.000,-</u>)
Ekuitas – LO Akhir	Rp.376.814.751.575,-
RK PPKD Akhir	
- RK PPKD Awal	Rp.
- Mutasi RK PPKD	Rp. <u>75.231.568.956,-</u>
RK PPKD Akhir	Rp. 75.231.568.956,-
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp. 452.046.320.531,-

5.5 Neraca

5.5.1 Aset Lancar sebesar Rp. 1.331.316.595,-

Selama tahun 2021 total aset lancar sebesar Rp. 1.331.316.595,- terdiri dari :

a. Kas	Rp. 264.269.777,-
b. Piutang	Rp. 3.000.000,-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

c. Biaya Dibayar Dimuka	Rp.	1.621.267,-
d. Persediaan	Rp.	1.062.425.551,-

Jumlah	Rp.	1.331.316.595,-

Aset lancar per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 1.331.316.595,- dibandingkan dengan aset lancar per 31 Desember 2020 (Audited) sebesar Rp. 1.445.338.131,-, terdapat selisih penurunan sebesar Rp. 114.021.536,- hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.4.1
Perbandingan Aset Lancar Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO.	URAIAN	2021	2020 (Audited)	Kenaikan/Penurunan
1	Kas	264.269.777	154.376.353	109.893.424
2	Piutang	3.000.000	0	3.000.000
3	Belanja Dibayar Dimuka	1.621.267	38.550.358	(36.929.091)
4	Persediaan	1.062.425.551	1.252.411.420	(189.985.869)
	Jumlah	1.331.316.595	1.445.338.131	(114.021.536)

Pengurangan/penurunan nilai aset lancar sebesar Rp. 114.021.536,- ternyata didapat dari unsur kas naik sebesar Rp. 109.893.434,- karena penerimaan BLUD.

Piutang kenaikan sebesar Rp. 3.000.000,- karena penerimaan BLUD yang belum terbayarkan.

Belanja Dibayar Dimuka penurunan sebesar Rp. 36.929.091,- karena penurunan permohonan permintaan kebutuhan subsidi BBM.

Penurunan nilai persediaan sebesar Rp. 189.985.869,- karena mutasi tambah kurang selama tahun 2021.

5.5.1.1 Kas

Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 264.269.777,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021



5.5.1.1.1 Kas di Kas Daerah

5.5.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0,-

Pada Tahun Anggaran 2021 BPSDM Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki Kas di Bendahara Penerimaan.

5.5.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,-

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 berjumlah Rp. 0,-

5.5.1.1.4 Kas dan Setara Kas di BLUD Rp. 264.269.777,-

Kas di Bank sebesar Rp. 264.269.777,- per 31 Desember 2021. Penerimaan ini berasal dari kode rekening 4.1.4.12.01 yaitu jasa layanan dank ode rekening 4.1.4.12.03 yaitu lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan 4.1.4.12.04 yaitu Hibah, uang tersebut diakui sebagai penerimaan BLUD Tahun Anggaran 2021.

5.5.1.2 Piutang Pendapatan Rp 3.000.000,-

Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.000.000,-

5.5.1.2.1 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp 3.000.000,-

5.5.1.2.1.1 Piutang BLUD Rp. 3.000.000,-

Saldo Piutang BPSDM Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2021 senilai Rp. 3.000.000,-. berupa piutang UPT Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik BPSDM Provinsi DKI Jakarta atas jasa layanan usaha BLUD pada penyelenggaraan kegiatan Seminar International, terdapat 4 peserta (@Rp.750.000,-/orang) yang belum melakukan pembayaran biaya kepesertaan hingga 31 Desember 2021. Piutang ini sudah di terima

BPSDM Provinsi DKI Jakarta 53

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021



tanggal 12 Januari 2022 dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan tanggal 24 Januari 2022 dari PT Transportasi Jakarta.

5.5.1.2.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp. 0,-

Penyisihan piutang tak tertagih BPSDM Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp. (0,-).

5.5.1.3 Belanja dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka BPSDM Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.621.267,- adalah sisa anggaran kegiatan BBM yang tidak dipergunakan lagi.

5.5.1.4 Persediaan

Persediaan sampai dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.062.425.551,-. Adalah Barang Pakai Habis.

Nilai ini didapat dari :

- Saldo awal 31 Desember 2020	Rp 1.252.411.420,-
- Pembelian selama Tahun 2021	<u>Rp 405.737.200,-</u>
Persediaan Barang Pakai Habis	Rp 1.658.148.620,-
- Pemakaian selama tahun 2021	<u>(Rp 595.723.069,-),-</u>
Saldo akhir 31 Desember 2021	Rp 1.062.425.551,-

Adapun pembelian selama tahun 2021 senilai Rp 405.737.200,-
Rincian terlampir.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021



Sedangkan pemakaian selama tahun 2021 senilai Rp 595.723.068 didapat dari :

- Pendistribusian selama tahun 2021	Rp 595.723.068,-
- Barang Rusak	Rp 0,-
- Barang hilang	<u>Rp 0,-</u>
Total ...	Rp 595.723.068,-

Adapun rinciannya terlampir.

5.5.2 Aset Tetap : Rp. 450.450.526.589,-

Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Berikut rinciannya :

5.5.2.1 Tanah : Rp. 447.890.625.000,-

Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp 447.890.625.000.- adalah nilai tanah yang dimiliki BPSDM Provinsi DKI Jakarta seluas 24.375 m2 yang lokasinya terletak di jalan HR. Rasuna Said. Nilai tanah tersebut ditetapkan berdasarkan nilai NJOP PBB Tahun 2012 untuk wilayah yang bersangkutan. yaitu sebesar Rp.18.375.000.- per m2.

5.5.2.2 Peralatan dan Mesin : Rp. 12.043.234.703,-

Saldo Peralatan dan Mesin BPSDM Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 12.125.842.203,- terdapat penambahan asset.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021



Tabel 5.4.10.2

Peralatan Mesin BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2021

1. BPSDM Provinsi DKI Jakarta	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2020(Audited)	Rp. 11.755.475.924,-
Jumlah Belanja Modal per 31 Desember 2021	Rp. 740.426.000,-
Penambahan Transfer Masuk dari SKPD Lain	Rp. 857.830.000,-
Reklasifikasi aset tetap menjadi barang Ekstrakomtabel al. :	Rp. (82.607.500,-)
- Meja Belajar 29 buah sebesar Rp 5.800.000,-	
- Jam Dinding 10 buah sebesar Rp 2.887.500,-	
- Papan Clipchart 55 buah sebesar Rp 72.600.000,-	
- Whiteboard uk 90x120 cm 1 buah sebesar Rp 1.320.000,-	
Koreksi Kurang Catat Barang	Rp. 0,-
Penghapusan	Rp. 63.281.546,-
Transfer Keluar ke SKPD Lain :	Rp (1.164.608.175)
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp. (0)
Saldo per 31 Desember 2021	Rp. 12.043.234.703,-

Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat penambahan dan pengurangan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal sebesar Rp740.426.000,-. antara lain :
 - a) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp114.300.000,-
 - b) Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp5.192.000,-
 - c) Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebesar Rp131.430.000,-
 - d) Belanja Modal Peralatan Studio Gambar sebesar Rp 37.775.000,-
 - e) Belanja Modal Alat Studio Lainnya sebesar Rp 34.717.500,-
 - f) Belanja Modal Personal Komputer sebesar Rp 360.167.500,-
 - g) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sebesar Rp 56.844.000,-
2. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Transfer Masuk dari SKPD lain sebesar Rp857.830.000,-. Antara lain :
 - a) Berita acara serah terima kendaraan dinas Nomor 1922/-077.323 tgl. 12 Agustus 2021 antara Pihak BPAD dan BPSDM tentang Kendaraan

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



- Dinas No. Pol. B 9800 PSD Merk Pick Up Double Cabin Nissan Navara VL 2.5 4x4 AT, Tahun Perakitan 2018, kode barang 02030103002, Nilai Perolehan Rp 451.000.000, rincian perlengkapan yang melekat STNK Asli (terlampir).
- b) Berita Acara Serah Terima Mutasi Mobil(Corolla Altis) Barang Inventaris BPSDM Provinsi DKI Jakarta Nomor 2270/-077.3; Kode Barang 02030101001, Kode Register 000001, Jenis Barang Mobil, Merek Toyota Corolla Altis, Tahun Pembelian 31/12/2015, Asal Usul Cara Perolehan Pembelian, volume 1, Harga Rp 406.830.000, Kondisi Barang Baik (terlampir).
3. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Ekstracomptable sebesar Rp82.607.500,- antara lain :
- a) Meja Belajar 29 buah sebesar Rp 5.800.000,-
 - b) Jam Dinding 10 buah sebesar Rp 2.887.500,-
 - c) Papan Clipchart 55 buah sebesar Rp 72.600.000,-
 - d) Whiteboard uk 90x120 cm 1 buah sebesar Rp 1.320.000,-
4. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Penghapusan sebesar Rp63.281.546,- (terlampir).
5. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Transfer Keluar ke SKPD lain sebesar Rp1.164.608.175,- antara lain :
- a) Berita acara serah Nomor 3547/-077.3 Nomor Polisi B 9800 PSD, Merk Nisa Navara Pickup, Tahun Perakitan Kendaraan 2019, Kode Barang 02030103002, nilai perolehan 451.000.000, Rincian perlengkapan STNK Asli dan Kunci. (terlampir).
 - b) Berita Acara Serah Terima Mutasi Partisi Barang Inventaris Nomor 2272/077.
 - 1) Kode Barang 02060105002, kode register 000001, Jenis Barang Partisi Ruangan, tahun pembelian 20/04/2020, asal usul cara perolehan pembelian, volume barang 1, harga Rp 192.925.975,- kondisi bak;

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



- 2) Kode Barang 02060105002, kode register 000001, Jenis Barang Perkakas Kantor, Tahun Pembelian 01/03/2019, Asal Usul Cara Perolehan Pembelian, volume Barang 1, Harga Rp113.852.200,-
- c) Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dinas Nomor 2450/-077.323, Nomor Polisi B 1017 PQB, Merk Sedan Toyota Altis 1.8 V, Tahun Perakitan 2015, kode Barang 02030101001, Nilai Perolehan Rp 406.830.000, Rincian Perlengkapan yang melekat STNK. Asli (terlampir).

5.5.2.3 Gedung dan Bangunan : Rp. 0,-

Bangunan dan Gedung milik BPSDM telah dihapuskan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1068 Tahun 2014 tentang Penghapusan Bangunan/Gedung Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga nilai Bangunan dan Gedung per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,-

5.5.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp. 0,-

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan BPSDM Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp. 0,-.

5.5.2.5 Aset Tetap Lainnya : Rp. 321.807.220,-

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp 321.807.220,- tidak terdapat penambahan dan pengurangan pada Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2021.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

5.5.10.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan: Rp. 0,-

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0.-

5.5.10.7 Akumulasi Penyusutan : Rp. 9.805.140.334,-

Akumulasi penyusutan berdasarkan nilai audited per 31 Desember 2020 sebesar Rp 8.872.151.099,- sedangkan diakhir tahun 2021 sebesar Rp 9.805.140.334,-.

Terdapat peningkatan senilai Rp 932.989.235,-. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.4.10.7

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Keterangan	Nilai Perolehan		Penyusutan		Setelah Penyusutan
	2021	2020 (Audited)	2021	2020 (Audited)	
Tanah	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	12.043.234.703	11.755.475.924	9.805.140.334	8.872.151.099	932.989.235
Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-

Berdasarkan data Akumulasi penyusutan di atas, maka besarnya Nilai Buku Aset Tetap Peralatan dan Mesin BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat diketahui dengan cara mengurangi Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 12.043.234.703,- dengan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar Rp. 9.805.140.334,- sehingga didapatkan nilai buku aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.238.094.369,-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



5.5.3 Aset Lainnya : Rp. 264.477.347,-

Aset lain-lain yang dimiliki BPSDM Provinsi DKI Jakarta senilai Rp. 511.517.103,- dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain senilai Rp 247.039.756,- sehingga Aset Lainnya menjadi senilai Rp 264.477.347,-.

5.5.4 Kewajiban : Rp. 0,-

Kewajiban BPSDM Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0,-.

5.5.5 Ekuitas : Rp. 452.046.320.531,-

Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih BPSDM Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2021. Untuk mendapatkan nilai Ekuitas dapat dilihat pada Laporan Perubahan Ekuitas. Nilai Ekuitas sebesar Rp. 452.046.320.531,- diperoleh dari Ekuitas LO akhir ditambah dengan RK PPKD akhir. Rincian Ekuitas Akhir dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ekuitas – LO Akhir	Rp. 376.814.751.575,-
RK PPKD Akhir	<u>Rp. 75.231.568.956,-</u>
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp. 452.046.320.531,-

5.6 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluar Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Pembiayaan dan aktivitas Non Anggaran sampai dengan 31 Desember 2021.



5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk pembiayaan aktivitas operasional UPT PPKKP dalam menyelenggarakan kegiatan dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2021 UPT PPKKP mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp 781.334.249,- dan arus kas keluar sebesar Rp 671.440.825,- sehingga didapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp 109.893.424,- dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.6.1
Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	31 Des 2020 (Audited)	31 Des 2021
Penerimaan Operasional BLUD	154.376.353	781.334.249
Arus Kas Keluar	0	671.440.825
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	154.376.353	109.893.424

Dilihat dari tabel diatas Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi adalah Rp109.893.424,- saldo kas awal BLUD Rp154.376.353,- sehingga saldo Akhir Kas setara Kas BLUD UPT Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik adalah sebesar Rp264.269.777,-.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang awalnya bernama Diklatprov berdiri pada tanggal 2 Juni 1968 pada masa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin dengan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor Ab. 12/1/5/1968 . Kemudian seiring dengan semakin meningkatnya peran Pendidikan dan Pelatihan dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Latihan Provinsi sehingga Diklatprov DKI Jakarta dikukuhkan menjadi lembaga instansi vertikal yang pembinaannya dilakukan oleh Badan Diklat Depdagri.

Kemudian sejalan dengan restrukturisasi organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka struktur organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimana Diklatprov DKI Jakarta berubah menjadi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta yang berlaku efektif per 1 Januari 2002.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah dimana Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta berubah menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta yang berlaku efektif 1 Januari 2009.

Seiring dengan berjalannya waktu Badan Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi DKI Jakarta mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, hal ini dilakukan untuk menjadikan pemerintahan yang memberikan manfaat konkret pada pelayanan publik.

Sejalan perkembangan zaman BPSDM Provinsi DKI Jakarta memiliki UPT PPKKP sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik.

6.2 Kedudukan dan Tugas Pokok

A. Kedudukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- 2) Badan Pengembangan sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

B. Tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia:

Tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai.

C. Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

- 1) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPSDM;
- 2) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BPSDM;
- 3) Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 4) Penyusunan peta kebutuhan, perencanaan calon peserta dan penyusunan materi serta kurikulum pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 5) Pengkajian dan pengembangan materi dan kurikulum program, metode dan alat bantu pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 6) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 7) Pengelolaan izin dan tugas belajar pegawai;
- 8) Pembinaan dan pengembangan widyaiswara, widyaiswara luar biasa serta pejabat fungsional pendidikan dan pelatihan pegawai lainnya;
- 9) Penyusunan metode pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 10) Penyediaan dan standardisasi alat bantu pendidikan dan pelatihan;
- 11) Pemberian sertifikat/surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
- 12) Penyusunan standar kompetensi teknis/fungsional pegawai;
- 13) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan asesor;
- 14) Pelaksanaan uji kompetensi teknis/fungsional pegawai ;
- 15) Penyusunan dan validasi alat ukur uji kompetensi teknis/fungsional;
- 16) Pengelolaan sertifikasi profesi pegawai;
- 17) Pelaksanaan sertifikasi, seleksi dan pengembangan pegawai;
- 18) Pemantauan evaluasi dan pelaporan/penyajian pemberdayaan pegawai alumni pendidikan, pelatihan, izin dan tugas belajar oleh SKPD/UKPD;

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021



- 19) Pembinaan, pengendalian, koordinasi, pemberian rekomendasi /standardisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan oleh SKPD/UKPD;
- 20) Pengembangan hubungan antar lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 21) Pengelolaan asrama pendidikan dan pelatihan pegawai ;
- 22) Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- 23) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang pendidikan dan pelatihan;
- 24) Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang BPSDM;
- 25) Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BPSDM;
- 26) Pengelolaan kearsipan, data dan informasi BPSDM; dan
- 27) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM.

6.3 Struktur Organisasi

- 1) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, maka disusun Peraturan Gubernur No. 111 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 113 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik.
 - a. Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :
 - 1) Kepala Badan;
 - 2) Sekretaris Badan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
 - c) Subbagian Keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021



- 3) Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional, terdiri dari :
 - a) Subbidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Kader;
 - b) Subbidang Pengembangan Kompetensi Manajerial;
 - c) Subbidang Pengembangan Kompetensi Fungsional
- 4) Bidang Standardisasi Pengembangan Kompetensi Teknis, Pemerintahan, dan Sosial Kultural :
 - a) Subbidang Standarisasi Pengembangan Kompetensi Teknis;
 - b) Subbidang Standarisasi Pengembangan Kompetensi Teknis Strategis;
 - c) Subbidang Standarisasi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural.
- 5) Bidang Penjaminan Mutu dan Tugas Belajar, terdiri dari :
 - a) Subbidang Penjaminan Mutu dan Pengembangan Sumber Belajar;
 - b) Subbidang Tugas Belajar;
 - c) Subbidang Pengelolaan dan Pengembangan Widyaiswara
- 6) UPT Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai, terdiri dari :
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Satuan Pelaksana;
 - c) Satuan Pelaksana;
 - d) Satuan Pelaksana.

Selain itu terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan Widyaiswara yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

- b. Struktur organisasi Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik a.l. :
 - 1) Kepala UPT;

- 2) Satuan Pengawas Intern;
- 3) Subbagian Tata Usaha
 - a) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis.
 - b) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis Strategis.
 - c) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pemerintahan dan Sosial Kultural.
 - d) Satuan Pelaksana Hubungan Antar Lembaga.

6.4 Sistem Pengendalian Intern

Dalam rangka mewujudkan visi misi organisasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta menerapkan Sistem Pengendalian Intern dalam setiap tahapan kegiatan dengan tujuan agar seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat dicapai secara efisien, efektif dan ekonomis. Sistem tersebut dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan dan ketentuan, baik berupa Peraturan Gubernur/Peraturan Daerah maupun ketentuan intern organisasi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan. Unsur-unsur yang melekat pada Sistem Pengendalian Intern, meliputi :

- 1) Organisasi;
- 2) Kebijakan;
- 3) Perencanaan;
- 4) Prosedur (SOP);
- 5) Akuntansi / Pelaporan;
- 6) Pelaporan;
- 7) Sumber Daya Manusia (personal);
- 8) Pengendalian Intern.



BAB VII

PENUTUP

Sebagai penutup dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 BPSDM Provinsi DKI Jakarta, dapat disampaikan sebagai berikut :

- 7.1 Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode akhir Tahun Anggaran 2021 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, telah disajikan berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, dan teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No 27 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Gubernur No 161 Tahun 2017.
- 7.2 Pencapaian target kinerja keuangan BPSDM Provinsi DKI Jakarta sampai dengan per 31 Desember 2021 didasarkan pada :
 - Capaian realisasi Belanja dengan anggaran sebesar Rp. 77.770.964.499,- sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 76.152.710.697,- atau 97,92%.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021



7.3 BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD selaku entitas akuntansi penggabung.

Demikian Laporan Keuangan BPSDM Provinsi DKI Jakarta sampai dengan per 31 Desember 2021.

Jakarta, Juni 2022

4 Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta, ↓


Mochamad Miftahulloh Tamary
NIP 197812131997111001